

**PANDANGAN MASYARAKAT KELURAHAN SAMATA KECAMATAN
SOMBA OPU TERHADAP LEGALITAS DINASTI POLITIK PADA
PEMILUKADA GOWA TAHUN 2015**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Jurusan Ilmu Politik (S.Sos) Pada

Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik

UIN Alauddin Makassar

Oleh

MISRA SAVITRI

NIM. 30600112056

FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, Pandangan Masyarakat Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Terhadap Legalitas Dinasti Politik Pada Pemilu 2015 yang disusun oleh saudari MISRA SAVITRI, NIM: 30600112056, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 13 Februari 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu politik (S.Sos), jurusan Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Makassar 17 November 2017.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Abullah Thalib, M.Ag.

Sekretaris : Syahrir karim, M. Si.,Ph.D.

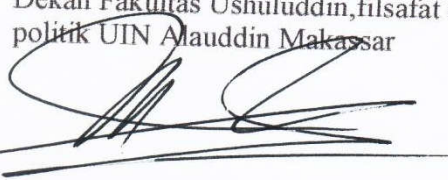
Munaqisy I : Syahrir karim, M. Si.,Ph.D

Munaqisy II : Drs. H. Ibrahim, M.Pd

Pembimbing I : Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si

Pembimbing II: Ismah Tita Ruslin, S.IP.,M.Si.

Diketahui oleh;
Dekan Fakultas Ushuluddin, filsafat dan
politik UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA.
NIP.19590704 198903 1 003

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Misra Savitri
NIM : 30600112056
Tempat/Tgl. Lahir : Baliara, 10 Januari 1995
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
Fakultas/Program : Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Alamat : Jln. H. M. Yasin Limpo No. 45 A Samata, Gowa
Judul : Pandangan Masyarakat Kelurahan Samata Kecamatan
Somba Opu Terhadap Legalitas Dinasti Politik Pada
Pemilukada Gowa Tahun 2015.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar adalah karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 November 2017
Yang menyatakan,

MISRA SAVITRI
NIM. 30600112056

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Atas berkat dialah penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan lebih tinggi untuk lebih menambah pengetahuan dan pengalaman di sebuah Universitas. Terima kasih atas nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat kesehatan, nikmat kasih sayang dan begitu banyak nikmat Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa curahkan kepada Junjungan kami Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Selamat menuntun ilmu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tak henti-hentinya Allah SWT melimpahkan beragam nikmatnya dan dibawah bimbingan para pendidik sehingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik.

Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua, H. Abdin T dan Hj. Maryana yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya, Kasih sayang-Nya, dan Maghfirah-Nya kepada keduanya.

2. Kepada saudara-saudari kandung penulis Misdalia Abdin S.S, Tri Agusta S.T, M.T, Musfirah Abdin S.Kep, dan Emy Purnawati S.Sos yang selalu memberikan nasihat dan perhatiannya kepada penulis.
3. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil Rektor, dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
4. Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, beserta para wakil Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik.
5. Kepada Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si. selaku ketua Jurusan Ilmu Politik, serta Syahrir Karim, S.Ag., M.Si., Ph.D. selaku sekretaris jurusan.
6. Kepada pembimbing skripsi, Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si, selaku Konsultan I dan Ismah Tita Ruslin S.IP, M.Si, selaku Konsultan II, yang selama bimbingan banyak memberi saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
7. Para Dosen Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar beserta staf Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu mengarahkan penulisan hingga tuntas penyelesaian.
8. Terkhusus pula untuk ibu Yuliati dan bapak Abd. Rahman selaku Ibu dan Bapak Kos penulis yang menjaga dan menyayangi penulis selayaknya anak sendiri, dan teman-teman seperjuangan: Rini Ketrin S.IP, Hasrini S.IP, Fatimah S.IP, Jumriani, Harianto S.IP, Jusmar S.IP, Wahyuddin S.IP, Hartono

S.IP, sertasemuateman-teman yang tidakdapatpenulissebutsatupersatu.

Terimakasihataskebersamaandandukungannyaselamaini.

Akhirnya, denganlapang dada penulismengharapkanmasukan, saran dankritikan-kritikan yang bersifatmembangun demi kesempurnaanskripsi ini.Kepada Allah SWT penulispanjatkando'a, semogabantuandanketulusan yang telahdiberikansenantiasabernilaiibadah di sisi Allah SWT, danmendapatpahala yang berlipatganda.Amin.

Samata, 22 November 2017

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
MISRA SAVITRI
NIM: 30600112056

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah	14
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS	22
1. Teori Kekuasaan.....	22
2. Teori Dinasti Politik dan Politik Kekerabatan	23
3. Teori Respon	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Metode Pengumpulan Data.....	33
D. Metode Analisis Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitan	36
a. Profil Kabupaten Gowa.....	36
b. Profil Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.....	45
c. Profil Kelurahan Samata	49
d. Peraturan Larangan Dinasti Politik	51
e. Jumlah Pemilih Kelurahan/Desa di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa Tahun 2015.....	55

B. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian.....	58
a. Pandangan Masyarakat Samata Kecamatan Sombaopu terhadap Legalitas Dinasti Politik Pada Pemilu tahun 2015	58
b. Respon KPU Terhadap Legalitas Politik Dinasti di Kabupaten Gowa	66
BABV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Implikasi Penelitian.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Nama Penyusun : Misra Savitri

NIM : 30600112056

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Terhadap Legalitas Dinasti Politik pada Pemilu 2015

Skripsi ini mengkaji tentang Pandangan Masyarakat Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Terhadap Legalitas Dinasti Politik pada Pemilu 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Masyarakat Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Terhadap Legalitas Dinasti Politik pada Pemilu 2015, dan Bagaimana respon KPU terhadap legalitas dinasti politik di kabupaten Gowa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan Jenis penelitian yang digunakan deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan pandangan masyarakat terhadap legalitas dinasti politik terbagi tiga yaitu: Pertama, masyarakat yang menyetujui dinasti politik. Kedua, masyarakat yang menyetujui dinasti politik dengan demokrasi. Ketiga, pola sikap masyarakat yang menyetujui dinasti politik. Dari ketiga point diatas menjelaskan perbedaan pendapat mengenai dinasti politik, namun ketiganya memiliki satu kesamaan yaitu masyarakat kelurahan Samata tetap menginginkan memilih secara demokratis. Adapun respon KPU terhadap legalitas dinasti politik di kabupaten Gowa. Pada dasarnya hanya mengikuti dan menjalankan setiap keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan dijalankan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Diharapkan kedepannya demokratisasi di Indonesia tidak lagi hanya berlandas pada kekuatan-kekuatan politik dinasti. Seharusnya hal ini bisa diminimalisir karena yang lebih utama adalah mengedepankan kepentingan partisipasi dan rakyat diatas kepentingan keluarga atau kelompok.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perubahan dramatis dalam perpolitikan Indonesia sejak kejatuhan rezim Soeharto telah membuka ruang bagi hadirnya demokrasi yang sesungguhnya. Politik lokal menjadi lebih terbuka dan menjadi penentu pembangunan di daerah. Demokrasi lokal menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kancah politik. Demikian pula membuka peluang yang besar bagi aktor politik untuk dipilih menjadi wakil rakyat atau menduduki suatu jabatan politik.

Perubahan sistem politik dari otoritarian menuju demokratis menghasilkan dua hal penting dalam perpolitikan lokal. Pertama, kendali politik di tingkat lokal dipimpin oleh elit yang merupakan kolaborasi dari penguasa pusat dan lokal dan kedua, munculnya fenomena orang-orang kuat di daerah.

Realitas politik rezim orde baru memang menghambat ruang gerak para elit politik di daerah, namun era demokrasi politik juga menimbulkan ambisi kekuasaan oleh aktor politik lokal. Hal ini seperti diungkapkan oleh Agustino dan Yusoff, bahwa kolaborasi antara elit pusat dan lokal kini menghilang, namun justru semakin menguatkan posisi penguasa-penguasa lokal sehingga pemerintahan demokratis yang sesungguhnya ditingkat lokal tidak benar-benar dicapai.¹

¹Agustino dan Yusoff, Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik, *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, 2010, hal 5

Kajian politik lokal di Indonesia menunjukkan bahwa transisi konstitusional tersebut justru melahirkan dominasi kekuasaan. Fenomena yang terjadi pada hampir semua daerah mengindikasikan hal tersebut, yang menunjukkan superioritas aktor politik lokal atau kembalinya entitas politik masa lalu yang mendominasi kekuasaan.

Dinasti politik adalah istilah yang paling umum untuk mendefinisikan siklus kekuasaan politik lokal dan objek tersebut menjadi ranah dari sekian banyak studi politik kalangan akademisi. Dari sini para analisis politik kemudian mencoba menyimpulkan bahwa demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia telah membuka peluang bagi perubahan dinamika politik lokal di berbagai daerah.

Terminologi dinasti politik misalnya ditemukan dalam *website* Mahkamah Konstitusi dengan uraian sebagai berikut:

Dinasti politik dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang dijalankan sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Istilah dinasti politik lebih identik dengan sistem kerajaan sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak atau kerabatnya sesuai tata cara yang diatur dalam sistem kerajaan tersebut agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga.²

Dwipayana berpendapat bahwa tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, dibandingkan *merit system* dalam menimbang prestasi. Disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu

²“Pengertian Politik Dinasti”, *Website Resmi Mahkamah Konstitusi*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses tanggal 19 februari 2016

pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.³

Hasil analisis Haryanto tentang dinasti politik juga menegaskan bahwa kecenderungan utama dinasti politik adalah para aktor politik menjalankan mobilisasi politik berdasarkan identitas (klan, suku, agama dan bahasa) dan jaringan (birokrat dan pengusaha), dengan hasil yang menunjukkan bahwa kandidat dengan jejaring personal (*personal network*) terkuatlah yang akan memenangkan pemilihan.⁴

Gejala dinasti politik yang memunculkan sentimen kekeluargaan dalam politik lokal di Indonesia dipahami sebagai hasil kombinasi dan tekanan politik sentralisasi pada masa Soeharto dan tekanan politik desentralisasi pasca-Soeharto. Meskipun periode awal pelebagaan desentralisasi ini belum terlihat, akan tetapi memasuki dekade kedua pasca-reformasi, kecenderungan oligarkis kekuasaan politik lokal semakin terlihat nyata.⁵

Pada umumnya para analis politik cenderung memandang praktik dominasi politik melalui perspektif aktor. Dengan kata lain aktor politik adalah penentu lahirnya dominasi. Perlu dikemukakan bahwa selain “agen”, struktur juga memberi peluang kuatnya praktik dominasi dalam demokrasi. Bahkan boleh jadi kesimpulan

³“Pengertian Politik Dinasti”, dalam <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses tanggal 19 februari 2016

⁴Haryanto, *Klanisasi Demokrasi; Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Polgom. 2014), hal 1

⁵Haryanto, *Klanisasi Demokrasi*, hal 2

besarnya bahwa kedua hal tersebut sama sekali tidak memengaruhi perkembangan demokrasi. Di Indonesia, kasus-kasus pasca-reformasi menjadi sebuah “laboratorium” untuk teori demokrasi.

Dalam praktiknya, dinasti politik memanfaatkan relasi keluarga, kerabat, kelompok politik dan juga menggunakan berbagai modal sebagai basis legitimasi kekuasaan. Indikasi terjadinya dinasti politik dapat dicermati pada dua aspek. Pertama, fenomena politik yang terjadi setelah para aktor politik berhasil mendapatkan kekuasaan dengan cara sedemikian rupa sehingga terciptalah oligarki. Kedua, proses tata kelola politik pemerintahan yang mereka lakukan (kepiawaian mengelola modal politik) sebagai pejabat, pengusaha, ataupun bangsawan.⁶

Dapat dipahami bahwa praktik dinasti politik ini menimbulkan berbagai dampak sosial politik. Satu di antara implikasinya adalah membuka peluang bagi orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan dan sebaliknya orang yang kompeten terabaikan karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasi karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.

Dalam perspektif ajaran Islam dijelaskan tentang kriteria memilih pemimpin sebagaimana dalam Q.S Al Ma'idah/5: 57

⁶Haryanto, *Klanisasi Demokrasi*, hal5

تَبَأُوتُوا الَّذِينَ مِن وَلَعِبَاهُ زُودِ يَنْكُمُ اتَّخَذُوا الَّذِينَ تَتَّخِذُوا أَلَاءَ مَنُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِن اللَّهَ وَاتَّقُوا أَوْلِيَاءَ وَالْكَفَّارَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْكَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.⁷

Yang demikian itu merupakan peringatan agar kaum muslimin tidak berlindung kepada musuh-musuh Islam, dan sekutunya dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan kaum musyrikin yang menjadikan syari'at Islam yang suci, muhkam (tegas), dan mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat, sebagai bahan ejekan dan permainan menurut keyakinan dan pandangan mereka yang rusak, dan fikiran mereka yang beku.⁸

Demikian pula tentang kriteria ideal pemimpin yang akan dipilih dalam Pemilu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi seperti keilmuan dan kepakaran untuk pantas dipilih oleh rakyat. Selain itu calon pemimpin harus mampu bersikap adil, *istiqomah*, memiliki pendapat dan pandangan luas, hikmah dan bijaksana. Karena itu tidak terlarang untuk berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih mereka bahkan

⁷Kementerian Agama RI. At-Thayyib; *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2011).

⁸<https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/09/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-maa-idah-ayat-57-58/>

tidak terdapat perbedaan mendasar antara pemilihan ini dengan pemilihan yang berlangsung pada masa *al-khulafa' ar-rasyidin*.

Partisipasi tersebut adalah bentuk menyampaikan amanah sebagaimana yang diperintahkan Allah untuk dijaga dan ditunaikan kepada ahlinya. Sebagaimana Q.S An Nisaa'/4: 58.

عَمَّا لِلَّهِ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكَمَتُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنِ تَتَوَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ ذ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁹

Amanat ialah "sesuatu yang dipercayakan" termasuk didalamnya segala apa yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta maupun ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dalam kitabnya "ihya 'ulumuddin" Imam Ghazali menerangkan amanat itu terbagi lima, yakni:

- a) Amanat Ilmu
- b) Amanat kehakiman/peradilan, hendaklah menghukum dengan adil

⁹Kementerian Agama RI. At-Thayyib; *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2011).

- c) Amanat tuhan kepada hambanya, seperti tubuh dirinya, panca indra, akal, agama dan sebagainya. Semuanya itu adalah amanat dari Allah kepada manusia, yang mesti dipeliharanya dengan sebaik-baiknya.
- d) Amanat manusia sesama manusia, baik berupa harta maupun berbentuk rahasia yang dipercayakan kepada kita. Maka adalah satu kewajiban kita untuk menyimpannya dengan sebaik-baiknya dan haram membukanya kepada orang banyak, dengan tidak seizin orangnya atau pihak yang mengamanatkan. Termasuk juga dalam amanat ini, menurut keterangan Al-Razi, keadilan dari pihak pemerintah, sebagai satu amanat yang mesti dipeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga ilmu yang diamanahkan Allah kepada ulama, sarjana hendaklah dijaga dan jangan disembunyikan dan hendaklah mereka menerangkan hukum atau apa yang diminta dari mereka itu.
- e) Amanat manusia kepada dirinya sendiri cara memelihara amanat yang kelima ini, menurut keterangan Al-Razi, ialah mengutamakan kebaikan bagi dirinya dan menjaga dirinya itu dari segala apa yang dapat mendatangkan bahaya kepadanya.

Ayat ini termasuk salah satu ayat yang terpenting dalam hukum syari'at, dan menurut zahirnya khitabnya ditujukan kepada segenap umat islam yang berhubungan dengan amanah.¹⁰

Diantara bentuk amanah yang dimaksud dalam ayat ini adalah memilih *ahlul 'ilmi wa al-iman* dan menyerahkan kepemimpinan kepada mereka. Islam adalah

¹⁰<http://newtafsir.blogspot.co.id/2015/10/qs-nisa-ayat-58.html>

agama memberikan kesempatan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, mengatur urusan masyarakat dan mampu bertanggung jawab terhadap tugas masing masing di antara mereka, sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) dari hal hal yang dipimpinnya (Buhary, muslim).¹¹

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggun jawab.Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai

¹¹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan, Himpunan Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim* (Cet. II; Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hal 709-710.

pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, dan seterusnya

Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (*atsar*) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Pertama-tama yang disampaikan oleh hadis di atas adalah bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, seseorang mesti bertanggung jawab untuk mencari makan atau menghidupi dirinya sendiri, tanpa bergantung hidupnya kepada orang lain.

Hakekat kepemimpinan adalah tanggungjawab dan wujud tanggungjawab adalah kesejahteraan, maka bila orang tua hanya sekedar memberi makan anak-anaknya tetapi tidak memenuhi standar gizi serta kebutuhan pendidikannya tidak dipenuhi, maka hal itu masih jauh dari makna tanggung jawab yang sebenarnya. Demikian pula bila seorang majikan memberikan gaji prt (pekerja rumah

tangga) di bawah standar ump (upah minimu provinsi), maka majikan tersebut belum bisa dikatakan bertanggungjawab. Begitu pula bila seorang pemimpin, katakanlah presiden, dalam memimpin negerinya hanya sebatas menjadi “pemerintah” saja, namun tidak ada upaya serius untuk mengangkat rakyatnya dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan, maka presiden tersebut belum bisa dikatakan telah bertanggung jawab. Karena tanggung jawab seorang presiden harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan kaum miskin, bukannya berpihak pada konglomerat dan teman-teman dekat. Oleh sebab itu, bila keadaan sebuah bangsa masih jauh dari standar kesejahteraan, maka tanggung jawab pemimpinnya masih perlu dipertanyakan.¹²

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggungjawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karena itu sebagai pemimpin, harus memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

¹²Hadis-hadis Tentang Pemimpin, dalam <https://zunlynadia.wordpress.com/2010/12/28/hadis-hadis-tentang-pemimpin/>, diakses tanggal 07 februari 2017

Dari kedua ayat dan hadis di atas menjelaskan tentang kepemimpinan dan tanggungjawab yang harus dipenuhi setiap pemimpin, begitu pula dengan Adnan Purictha ichsan yang merupakan anak dari Ichsan Yasin Limpo, Bupati Gowa dua periode 2005-2015 dan merupakan kamanakan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang juga pernah memimpin Gowa pada 1994-2002, walaupun Adnan adalah garis keturunan dari keluarga Yasin Limpo, namun tidak menghalangi Adnan melakukan kampanye disejumlah daerah termasuk di kelurahan Samata. Adnan tidak memanfaatkan keluarganya yang pada saat itu berpengaruh besar terhadap Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Gowa untuk mewujudkan keinginannya menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Gowa. Namun kepemimpinannya saat ini terjadi karena melalui berbagai tahap termasuk pemilu pada saat itu.

Dinasti politik sesungguhnya bukan sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara Indonesia. Sebab negara Indonesia tidak menerapkan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Tetapi fakta menunjukkan bahwa praktik dinasti politik ini masih menggejala bahkan dilegitimasi melalui undang-undang. Hal ini misalnya terjadi di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang merupakan lokasi penelitian ini.

Pada awalnya dinasti politik merupakan sesuatu praktik politik terlarang sebagaimana pernyataan hukum yang berlaku. Ketentuan tentang larangan dinasti politik tersebut tercantum dalam UU Pemilu Pasal 7 Huruf r yang menyatakan:

Tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahana bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati

dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota) dengan penjelasan, yaitu yang memiliki ikatan perkawinan dan darah lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang termasuk dalam persyaratan tersebut adalah suami/ istri, orangtua, mertua, paman, bibi, anak, menantu, adik, kakak, dan ipar kecuali jeda satu periode (lima tahun).¹³

Namun, realitasnya pasca publikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, hampir semua partai politik dan khususnya para bakal calon kepala daerah sudah mempersiapkan berbagai upaya dalam Pemilukada serentak di Kabupaten Gowa.

Salah satu upaya para aktor politik yang dimaksud adalah strategi untuk menyasiasi peraturan tentang larangan “berdinasti politik”. Bahkan lebih jauh lagi salah satu anggota DPRD Kabupaten Gowa, yaitu Adnan Purichta Ichsan yang juga berstatus anak Bupati Gowa saat itu, Ichsan Yasin Limpo, dan bakal calon Bupati Gowa periode 2016-2021 mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Adnan Purichta Ichsan permohonan uji materi tersebut sangat konstitusional karena memang secara yuridis normative. Dalam konteks ini mekanisme uji materi adalah saluran paling konstitusional untuk menguji ketentuan dalam undang-undang yang sudah tercantum dalam lembaran negara.

¹³“Politik Dinasti dan UU Pilkada”, dalam <http://nasional.kompas.com> diakses, 19 februari 2016

Argumentasi yang mendasari Adnan Purichta Ichsan untuk mengajukan uji materi atas ketentuan Pasal 7 Huruf r tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena menilai peraturan tersebut membatasi hak politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, dan melanggar konstitusi terutama Pasal 28D Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Hasil uji materi tersebut berkaitan dengan konstitusionalitas aturan bagi calon kepala daerah agar tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana dalam Pemilukada.

Diterimanya permohonan Adnan Purichta Ichsan terkait uji materi mengantarkan dia sebagai salah satu peserta Pemilukada serentak 2015 dan berhasil memenangkan Pemilukada Gowa 2015. Kemenangan Adnan Purichta Ichsan ini semakin mengukuhkan jejak keluarga Yasin Limpo di Kabupaten Gowa. Adnan Purichta Ichsan merupakan anak Ichsan Yasin Limpo, Bupati Gowa dua periode 2005-2015 dan merupakan kamanakan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang juga pernah memimpin Gowa pada 1994-2002.

Realitas politik tersebut terlihat bahwa aktor politik justru selalu mencari celah atau menyiasati norma undang-undang. Padahal, keberadaan Pasal 7 Huruf r bertujuan memperbaiki praktik politik yang berlangsung selama ini. UU Pemilukada

sejatinya dalam rangka memperbaiki demokrasi lokal yang selama ini memiliki kekurangan, terutama dalam hal munculnya fenomena politik dinasti di sejumlah daerah.¹⁴

Fenomena dinasti politik kemudian menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut pasca legitimasi “dinasti politik” melalui putusan final Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melaksanakan penelitian tentang dinasti politik di Kabupaten Gowa. Argumentasi yang mendasari penelitian ini adalah dominasi kekuasaan politik (dinasti politik) tentu akan menimbulkan resistensi dari aktor atau kelompok politik tertentu maupun dari pihak masyarakat yang terfragmentasi atau menunjukkan wacana pro dan kontra atas legitimasi dinasti politik itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka orientasi penelitian ini berfokus pada pandangan masyarakat tentang legalitas dinasti politik dengan mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Dengan maksud demikian maka judul penelitian yang diajukan adalah **“Pandangan Masyarakat Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Terhadap Legalitas Dinasti Politik Pada Pemilu 2015”**.

¹⁴“Politik Dinasti dan UU Pilkada”, dalam <http://nasional.kompas.com> diakses, 19 februari 2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanapandangan masyarakat Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu terhadap legalitas dinasti politik pada PemiluKada Gowa tahun 2015?
2. Bagaimana respon KPU terhadap legalitas dinasti politik di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu terhadap legalitas dinasti politik pada PemiluKada Gowa tahun 2015.
- b. Mengetahui respon KPU terhadap legalitas dinasti politik di Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu politik khususnya dalam konteks kajian tentang dinasti politik dalam momentum PemiluKada Sulawesi Selatan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi seluruh pihak yang berkompeten, bagi praktisi politik, pengamat politik, akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam upaya mengkaji realitas dinasti politik dalam momentum PemiluKada Sulawesi Selatan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu bertujuan menjelaskan hasil bacaan terhadap literatur ilmiah atau hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Untuk penelitian lapangan, kajian pustaka bertujuan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, pokok masalah yang akan diteliti mempunyai hubungan dengan sejumlah teori yang telah ada.¹⁵

Penelitian dengan objek dinasti politik dalam momentum Pemilu 2014 telah dilakukan oleh beberapa kalangan akademisi dari berbagai universitas. Terdapat keragaman perspektif pendekatan teori dan metode penelitian yang mereka gunakan, sehingga gambaran hasil penelitian yang diperoleh terkait analisis manajemen sumber daya manusia pun bervariasi. Berikut adalah beberapa hasil kajian penelitian terdahulu yang dimaksud.

1. Skripsi dengan judul “Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia” yang disusun oleh Suyadi, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014.¹⁶ Orientasi penelitian Suyadi tersebut berfokus pada pemetaan bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia dan menganalisis pandangan politik Islam terhadap politik dinasti di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan teori

¹⁵Muljono Damopolii, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), hal 13-14.

¹⁶Suyadi, “Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia”, *Skripsi* (Jurusan Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

perilaku politik (*political behaviourism*) dan budaya politik (*political culture*) sebagai kerangka dasar untuk menganalisis bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan Suyadi adalah penelitian kualitatif dengan metode *library research* untuk mengumpulkan data primer. Hasil penelitian Suyadi menunjukkan bahwa politik dinasti di Indonesia merupakan wujud dari perilaku politik masyarakat Indonesia yang dalam perjalannya kemudian menjadi kultur politik. Karakter politik dinasti di Indonesia cenderung sebagai bentuk politik dinasti negara dunia ketiga, yang berarti bahwa lebih identik dengan nuansa keturunan daripada kualitas aktor politik dan kaderisasi partai politik.

2. Skripsi dengan judul “Dinasti Politik Pemerintah Desa di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat”, merupakan penelitian sejenis yang dilakukan oleh Samsu Alam, mahasiswa jurusan ilmu politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.¹⁷ Penelitian tersebut mengetengahkan fokus masalah tentang pola dan penyebab dinasti politik dalam pemerintahan Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan Alam adalah penelitian kualitatif dengan format wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kompenensial. Hasil penelitian Alam menunjukkan bahwa bertahanya dinasti

¹⁷Samsu Alam, “Dinasti Politik Pemerintah Desa di Kabupaten Polewali Mandar”, *Skripsi* (Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar).

Patjiddai dalam jabatan kepala desa pada pemerintah Desa Katumbangan karena adanya beberapa faktor pendukung yang sangat kuat dan solid dalam mempertahankan dinasti tersebut. Untuk mempertahankan jabatan sebagai kepala desa, dinasti Patjiddai pada proses Pilkades mengerakkan sumber daya yang benar-benar mendukung dengan sepenuh hati dan faktor ekonomi, serta sumber alam yang dikuasai oleh dinasti Patjiddai. Keberhasilan dalam mempertahankan dinasti juga ditunjang oleh elit masyarakat desa Katumbangan yang berhasil digerakkan untuk tetap mendukung calon dari keluarga Patjiddai.

3. Skripsi dengan judul “Politik Dinasti Studi Terhadap Kepemimpinan Andi Idris Galigo periode 2008-2013 di Kabupaten Bone”, yang disusun oleh Husman Husain. Penelitian tersebut berfokus pada pengaruh politik dinasti Andi Idris Galigo di Kabupaten Bone serta implikasinya bagi proses demokrasi Indonesia. Dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa politik dinasti sebenarnya mempunyai dampak positif yaitu sebagai penguatan ideologis partai politik dan juga memiliki dampak negatif seperti dalam sistem politik dinasti yang dicontohkan oleh kabupaten Bone justru sebaliknya tidak mengacu pada sistem demokrasi esensial. Artinya bahwa aktor yang akan muncul dalam demokrasi ini berputar disekitar itu-itu saja. Ditegaskan Husain

dalam pengamatannya bahwa politik kekerabatan telah keluar dari substansial demokrasi itu sendiri.¹⁸

4. Tesis dengan judul “Etnisitas, Primordialisme, Dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan; Studi Pilkada Di Sulawesi Selatan” yang disusun oleh Sugiprawaty, mahasiswi jurusan Ilmu Politik Pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.¹⁹ Penelitian tersebut mengangkat permasalahan tentang berakhirnya dominasi elit berbasis etnis Bugis yang menandakan perubahan konstelasi elite politik di Sulawesi Selatan. Kerangka teoretis yang digunakan Sugiprawaty adalah teorikorporatisme negara oleh Philippe C. Schmitter, teori regenerasi elit politik oleh Pareto dan teori politik wacana (politik identitas etnik) dan biopolitik oleh Foucault. Sementara metode penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan format wawancara dan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian Sugiprawaty menunjukkan bahwa ketokohan dan kompetensi yang dimiliki Syahrul menjadi faktor yang determinan dalam memenangkan pemilihan gubernur. Syahrul memiliki keterampilan politik dalam mendapatkan dukungan dari: lintas partai politik, lintas etnis, dan lintas agama. Jejaring politik Syahrul di berbagai organisasi dan semua kalangan termasuk

¹⁸Husman Husain, “Politik Dinasti Studi Terhadap Kepemimpinan Andi Idris Galigo periode 2008-2013 di Kabupaten Bone”, *Skripsi*(Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2014).

¹⁹Sugiprawaty, “Etnisitas, Primordialisme, Dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan; Studi Pilkada Di Sulawesi Selatan”, *Tesis* (Jurusan Ilmu Politik Pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009).

komunitas masyarakat Sulawesi Selatan yang beragama Kristen yang kemudian memberikan arti yang signifikan terhadap kemenangannya dengan dukungan Partai Damai Sejahtera dan dukungan Persatuan Pendeta Sulawesi Selatan. Selain itu Syahrul menggunakan pendekatan primordial (ikatan kekeluargaan, kesukuan, dan kewilayahan).

5. Jurnal berjudul “Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan pada Walikota Probolinggo”, yang disusun oleh Masda Putri Amelia. Metode yang digunakan adalah yaitu metode kualitatif dengan format pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.²⁰ Hasil penelitian Masda Putri menunjukkan bahwa dinasti politik banyak dibangun di beberapa daerah di Indonesia, dimana kekuasaan yang dipegang secara turun-temurun dalam satu garis keturunan atau kerabat dekat. Hal ini ditandai dengan tersebarnya jejaring kekuasaan melalui politik pendahulunya dengan cara penunjukan anak, istri, paman, dan semacamnya untuk menduduki pos-pos strategis dalam partai (lembaga) politik. Menurut analisis Masda Putri, dinasti politik dapat menghambat sistem demokrasi karena tidak memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam proses politik. Dinasti Politik di daerah dapat dilihat dari hubungan antara aktor-aktor dalam struktur politik, yang mana terdapat hubungan keluarga diantara mereka. Beberapa teman dekat walikota juga menduduki posisi-posisi dalam infrastruktur yaitu sebagai

²⁰Masda Putri Amelia, Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan pada Walikota Probolinggo, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4, No. 3, Agustus-Desember 2015, hal 119

kelompok kepentingan, dalam hal ini adalah sebagai elite ekonomi dan elite agama. Keluarga beserta teman dekat walikota memiliki sumber-sumber kekuasaan yang dapat memengaruhi masyarakat sehingga kedudukan dari elite tersebut sangat terlihat dalam masyarakat. Hubungan walikota dengan keluarga dan teman dekatnya merupakan jejaring yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya.

Dari kelima penelitian tersebut dapat dilihat adanya persamaan dalam konteks pemilihan objek penelitian, yaitu dinasti politik sebagai objek penelitian. Namun ikhtisar penelitian terdahulu juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Letak perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini antara lain adalah dari fokus permasalahan, pendekatan teori yang digunakan, metode penelitian dan hasil penelitian.

Penelitian Suyadi lebih berfokus pada pemetaan bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia. Dengan demikian penelitian Suyadi memiliki ruang lingkup kajian yang sangat luas dan tidak menentukan satu kasus peristiwa (dinasti politik di daerah tertentu) sebagai objeknya. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada satu daerah yakni Kabupaten Gowa sebagai konteks kasus penelitian.

Dari segi penentuan lokasi dan metode penelitian, skripsi Samsu Alam, Husman Husain, Masda Putri dan Sugiprawaty lebih mendekati orientasi penelitian ini. Namun perbedaan signifikan dari kelima penelitian terdahulu adalah terletak dari segi pendekatan teoretis dan fokus penelitian, dimana peneliti menganalisis konsep regulasi Pemilu terkait dinasti politik yang telah mengalami perubahan, dari

ketentuan “larangan dinasti politik” sebagaimana konsep UU Pemilu pada menuju “legitimasi dinasti politik” melalui uji materi yang kemudian disahkan (konstitusional) oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada tataran analisis konsep regulasi Pemilu untuk melihat posisi hukum dinasti politik. Penelitian ini juga berfokus pada analisis terhadap pandangan masyarakat terkait legitimasi dinasti politik melalui UU Pemilu. Analisis ini dianggap penting sebab realitas masyarakat Kabupaten Gowa sesungguhnya terpolarisasi (pro kontra) atas regulasi Pemilu tersebut meskipun telah diobjektifikasi-dilegitimasi lewat nalar hukum yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

1. Teori Kekuasaan

Michel Foucault dalam Konsep Kekuasaan (*power/duvoir*) menurut Foucault tidak terlepas dari relasinya dengan pengetahuan (*knowledge/savoir*). Foucault melihat relasi pengetahuan dan kekuasaan sangat erat, dalam *The Archaeology Of Knowledge*, Foucault menjelaskan konsep *discourse* (diskursus) sebagai gambaran bagaimana pengetahuan bekerja sebagai kumpulan pernyataan. Kekuasaan tersebar dan datang dari mana saja.²¹

Penggunaan kekuasaan berlangsung dan bekerja dalam ruang pilihan-pilihan bagi mereka yang berada dalam posisi untuk memilih. Kekuasaan mempengaruhi pilihan-pilihan atas beberapa kemungkinan pilihan. Kekuasaan ditunjukkan dengan adanya kebebasan untuk memilih dan dijalankan terhadap subjek-subjek bebas yang memiliki kebebasan untuk memilih dan mempengaruhi. Kekuasaan terwujud dalam pemunculan dan pelibatan “permainan-permainan strategi antara pemilik-pemilik kebebasan memilih (*strategis games between liberties*). Permainan-permainan strategis bekerja dalam segala tempat dan waktu hingga pada ruang bawah sadar yang selanjutnya sangat mempengaruhi kecenderungan terhadap pilihan-pilihan. Permainan-permainan strategis melibatkan kekuasaan (*power*) meyebar dimana-mana, dijalankan

²¹Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013) hal 74

oleh siapapun dan tumbuh dalam segala level kuasa. Dari bekerjanya kekuasaan dan permainan-permainan strategisnya.²²

Kekuasaan bisa muncul dalam suatu proses hubungan pertukaran, karena kekuasaan merupakan hasil hubungan pertukaran yang timbang. Kekuasaan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang membutuhkan sesuatu dari seseorang atau sekelompok orang lainnya, namun tidak mempunyai sesuatu yang sama nilainya sebagai penukar, sehingga barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut hanya bisa dipenuhinya melalui ketundukan atau kepatuhan terhadap kekuasaan mereka yang menguasai barang dan jasa tersebut.²³

2. Teori Dinasti Politik dan Politik Kekerabatan

Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Sebelum munculnya gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan elit partai politik, elit militer dan

²² Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013) hal 74-75.

²³ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013) hal 75-77.

polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta elit aktifis.²⁴

Bagi banyak spesialis, tata aturan kekerabatan tidaklah secara teoritis mengesampingkan aturan politik. Menurut definisi morgan terdahulu, kekerabatan mengatur keadaan *socitas* dan yang kedua mengatur *civitas*. Atau menggunakan terminologi yang sering digunakan sekarang ini yang pertama merujuk pada struktur-struktur *respositas* dan kedua merujuk pada dikotomi yang jelas. Dalam kasus ini, ada dikotomi yang jelas dan dikotomi inipun tampil dalam teori marxis dimana masyarakat berkelas dan negara adalah hasil dari terpecahnya komunitas-komunitas primitif, serta politik muncul dengan menghilangnya ikatan-ikatan hubungan darah personal. Hal ini sering ditemukan dalam tradisi filsafat, terutama fenomenologi Hegel yang membuat oposisi paralel antara yang universal dengan yang paralel yaitu antara negara dan keluarga, wilayah maskulin dengan wilayah femini dan lain sebagainya.

Politik kekerabatan dan dinasti atau keluarga politik semakin tampak menguat. Ini tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan parpol dalam pemilu dan khususnya pada pemilukada. Untuk memenangi *political offices*, selain menyandarkan pada tokoh-tokoh pesohor atau yang memiliki uang besar untuk politik pencitraannya, parpol juga semakin tergiring untuk mendukung kandidat-kandidat yang diajukan oleh para petahana (*incumbent*) yang masih

²⁴”Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Politik” <http://riset.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/PERANGKAP-DINASTI-POLITIK-DALAM-KONSOLIDASI-DEMOKRASI.pdf>, hal. 117 diakses Kamis, tanggal 1 Desember 2016

memiliki banyak *political resources* dan otoritas formal atau yang sudah tidak mungkin lagi maju berkompetisi karena aturan pembatasan masa jabatan. Ikatan kekerabatan dengan para *incumbent* atau tokoh sentral parpol jelas saja membuat nepotisme dan favoritisme menjadi menonjol. Politik kekerabatan atau keluarga politik memang dapat dijumpai di hampir semua negara.²⁵

Jauh dari memandang kekerabatan dan kekuasaan itu sebagai pengertian yang saling meniadakan, antropologi politik telah memperlihatkan ikatan-ikatan kompleks antara dua sistem itu, menganalisisnya, serta mengembangkan teori-teori mengenai hubungan-hubungan itu dengan berlandaskan kepada karya lapangan. Meskipun demikian, tidaklah mudah untuk membedakan antara hubungan antara kekerabatan dan kekuasaan dengan menimbang begitu eratnya hubungan antara keduanya. Dibanyak masyarakat-masyarakat primitif misalnya banyak ditemui adanya kekuasaan yang selalu disandingkan dengan kekerabatan. Hal ini dapat dilihat dari kriteria masyarakat primitif khususnya dalam keanggotaan suatu komunitas politik. Seperti halnya metode keturunan baik dari garis keturunan patrilineal maupun matrilineal terutama mengkondisikan kewarganegaraan dalam masyarakat-masyarakatnya serta didasarkan atas hubungan-hubungan dan kelompok-kelompok yang disusunnya secara tajam yang akan berbeda dengan kekerabatan dalam pengertian ketatnya. Sedangkan dalam masyarakat segmenter yang menarik sebuah

²⁵“Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik” <http://www.cs.unsyiah.ac.id/~frdaus/PenelusuranInformasi/File-Pdf/harjanto-politik-kekerabatan.pdf>, hal. 154 diakses jum’at, tanggal 02 Desember 2016

sistem perbudakan domestik, status para budaknya didefinisikan terutama dalam pengertian pengucilan dari sebuah garis keturunan dan mengambil bagian sebagai kontrol atas kehidupan masyarakat.²⁶

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja didasarkan karena adanya hubungan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga tetapi karena adanya hubungan darah. Selain itu juga menyebutkan bahwa kunci pokok sistem perkawinan bukan karena hubungan darah melainkan juga berasal dari kelompok keturunan (lineage) atau garis keturunan (descent). Antara anggota kelompok keturunan saling berhubungan karena memiliki nenek moyang yang sama dan kelompok kekerabatan ini bisa bersifat patrilineal atau matrilineal.

Kekerabatan biasanya selalu berdampingan dengan kekuasaan sehingga kekuasaan dipandang sebagai suatu gejala yang selalu terdapat dalam proses politik, namun para ilmuwan politik tidak ada yang sepakat mengenai perumusan pengertian kekuasaan. Bahkan beberapa diantaranya menyarankan agar konsep kekuasaan ditinggalkan dengan alasan bersifat kabur dan selalu berkonotasi emosional. Namun tampaknya politik tanpa kekuasaan apalagi yang sekarang muncul adalah fenomena politik kekerabatan ibarat agama tanpa moral. Karena modern ini banyak para aktor

²⁶ "Teoti Dinasti Politik dan Kekerabatan" <http://digilib.uinsby.ac.id/6385/5/Bab%202.pdf>
diakses sabtu, 19 November 2016

politik yang selalu melibatkan keluarganya untuk berkecimpung juga dalam dunia politik hal ini terlihat diberbagai daerah menjelang pemilihan kepala daerah yang serentak dilakukan pada akhir-akhir ini.²⁷

Di indonesia politik kekerabatan identik dengan kekuasaan dikeluarga atau dikerabat politik tertentu. Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Jika kecenderungan ini semakin meluas, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat politik indonesia akan seperti yang terjadi di Filipina dimana Bossism berbasis teritorial menguasai politik. Negara dijalankan oleh segelintir elit dari beberapa keluarga, kalm, atau dinasti politik yang kuat diwilayah-wilayah tertentu dan karenanya sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial.²⁸

3. Teori Respon

Respons berasal dari kata response yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (reaction). Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa respons adalah tanggapan atau reaksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Inonesia, respons adalah tanggapan, reaksi, jawaban, terhadap suatu gejala, atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya menurut kamus besar ilmu pengetahuan dijelaskan bahwa respons adalah reaksi psikologi metabolic terhadap tibanya suatu rangsangan. Penjelasan

²⁷ "Teoti Dinasti Politik dan Kekerabatan" <http://digilib.uinsby.ac.id/6385/5/Bab%202.pdf>
diakses sabtu, 19 November 2016

²⁸ "Teori Dinasti Politik dan Kekerabatan" <http://digilib.uinsby.ac.id/6385/5/Bab%202.pdf>
diakses sabtu, 19 November 2016

mengenai definisi respons menurut dua kamus besar diatas, kurang lebihnya hampir sama, namun sejauh mana respons yang dimaksud kurang begitu mendalam, lalu berbeda pada pembendaharaan kalimat, yang satu memakai gejala atau peristiwa, yang lain mengenakan rangsangan.²⁹

Respons dikatakan Darly Beum sebagai tingkah laku balas atau sikap yang menjadi tingkah laku adekuat. Sementara itu Scheerer menyebutkan respons merupakan proses pengorganisasian rangsang dimana rangsang-rangsang prosikmal di organisasikan. Sedemikian rupa sehingga sering terjadi representasi fenomenal dari rangsang prosikmal. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi berbicara mengenai respon atau tidak respon tidak terlepas dari pembahasan sikap. Respon juga diartikan suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penilaian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu. Melihat sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu maka akan diketahui bagaimana respon mereka terhadap kondisi tersebut.³⁰

Menurut Louis Thursone, respon merupakan jumlah kecenderungan dan perasaan, kecurigaan, dan prasangka, pra pemahaman yang mendetail, ide-ide, rasa

²⁹“PengertianTeori”,<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5974/1/ANGGI%20RIA%20PUSPITASARI-FDK.PDF>, diakses Kamis, 1 Desember 2016

³⁰“TeoriRespon”<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22529/3/Chapter%20II.pdf>, hal 1-3 diakses Sabtu, 19 November 2016

takut, ancaman dan keyakinan tentang suatu hal yang khusus. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa cara pengungkapan sikap dapat melalui:

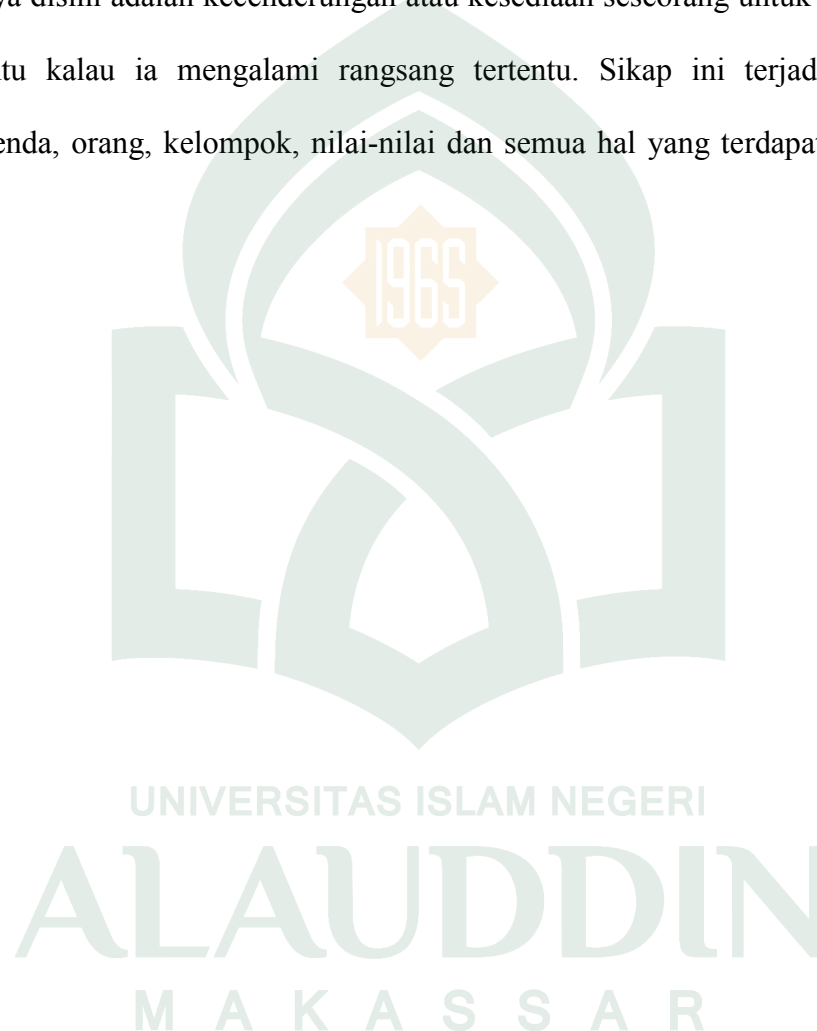
1. Pengaruh atau penolakan
2. Penilaian
3. Suka atau tidak suka
4. Kepositifan atau kenegatifan suatu objek psikologi

Perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respon seseorang atau sekelompok orang terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan lingkungan atau situasi lain. Sikap yang muncul dapat positif yakni cenderung menyenangkan, mendekati dan mengharapkan suatu objek, seseorang disebut mempunyai respon positif dilihat dari tahap kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Sebaliknya seseorang mempunyai respon negatif apabila informasi yang didengarkan atau perubahan suatu objek tidak mempengaruhi tindakan atau malah menghindari dan membenci objek tertentu. Terdapat dua jenis variabel yang mempengaruhi respon :

1. Variabel struktural yakni faktor-faktor yang terkandung dalam rangsangan fisik
2. Variabel fungsional yakni faktor-faktor yang terdapat dalam diri si pengamat, misalnya kebutuhan suasana hati, pengalaman masa lalu.

Menurut Hunt (1962) orang dewasa mempunyai sejumlah unit untuk memproses informasi-informasi. Unit-unit ini dibuat khusus untuk menangani representasi fenomenal dari keadaan diluar individu. Lingkungan internal ini dapat digunakan untuk memperkirakan peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar. Proses yang

berlangsung secara rutin inilah yang disebut Hunt sebagai suatu respon. Teori rangsang balas (stimulus respon theory) yang sering juga disebut sebagai teori penguat dapat digunakan untuk menerangkan berbagai gejala tingkah laku sosial dan sikap. Yang artinya disini adalah kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku tertentu kalau ia mengalami rangsang tertentu. Sikap ini terjadi biasanya terhadap benda, orang, kelompok, nilai-nilai dan semua hal yang terdapat di sekitar manusia.³¹



³¹“TeoriRespon”<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22529/3/Chapter%20II.pdf>, hal 1-3 diakses sabtu, 19 November 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Orientasi dasar penelitian ini adalah mengkaji pandangan masyarakat terhadap legalitas dinasti politik pada Pemilu 2015. Fokus permasalahan yang diajukan adalah pandangan masyarakat terhadap legalitas dinasti politik pada Pemilu 2015.

Berdasarkan orientasi demikian maka penelitian ini terutama membutuhkan data-data empiris baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual dari subjek yang diteliti. Dalam hal ini jenis penelitian kualitatif dengan format studi kasus dianggap relevan untuk digunakan.

Menurut Bungin, penelitian kualitatif cenderung menggunakan strategi memperoleh data di lapangan (*field research*).³² Bog dan Taylor dalam kutipan Moleong, mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³³

Penelitian ini diselenggarakan di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yakni lokasi peneliti melakukan wawancara dengan pemilih

³²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal 28.

³³Lexy Johannes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal 3.

(informan) tentang pandangan masyarakat terhadap legalitas politik dinasti di Kecamatan SombaOpu Kabupaten Gowa.

B. Sumber Data

Menurut Lofland dalam kutipan Moleong, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, data tertulis, dokumen, grafik dan statistik.³⁴ Sedang menurut Berg seperti yang dikutip Miles dan Huberman, data kualitatif mengacu pada esensi manusia, objek, dan situasi. Secara esensial, pengalaman kasar tersebut kemudian diubah menjadi tulisan, yang masing-masing bagiannya terakumulasi dalam teks yang diperluas.³⁵ Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data primer

Sumber data primer berupa data lisan yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui proses wawancara dan observasi. Penggunaan data primer sesuai dengan orientasi penelitian kualitatif yang menekankan alur induktif, yakni dari data ke teori atau dari data kasus yang spesifik untuk didiskusikan dengan berbagai teori yang relevan.

b. Data sekunder

³⁴Lexy Johannes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal 112.

³⁵Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, eds., *Handbook of Qualitative Research* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 593.

Sumber data sekunder berupa data tertulis atau literatur ilmiah yang memuat teori, konsep dan metode penelitian, berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian atau berupa catatan pribadi, grafik-foto, maupun hasil penelitian akademisi. Data sekunder merupakan data pembanding atau sebagai kerangka dasar untuk membangun sebuah teori penelitian yang berkorelasi dengan temuan data lapangan.

C. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sebelumnya telah dirancang dalam instrumen penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya:

Tabel 3.1

Daftar Informan

No	Nama Informan	Usia	Status/Profesi	Waktu Wawancara
1	H. Makmur Hamka	48 thn.	Tokoh Masyarakat Kel. Samata	
2	Jamaluddin Dg. Nampo	56 thn.	Ketua Imam kel. Samata	
3	H. Ibrahim Dg. Gassing	73 thn.	Kepala Lingkungan Masyarakat Kel. Samata	
4	Muh. Sukri	27 thn.	Tokoh pemuda Kel. Samata	
5	Dg. Anne	46 thn.	Tokoh Perempuan Kel. Samata	
6	Hendra	25 thn.	Tokoh pemuda Kel. Samata	

7	Nuryati	27 thn.	Masyarakat Kel. Samata	
8	Tuti Nilawaty	24 thn.	Masyarakat Kel. Samata	
9	Dg. Illang	39 thn.	Masyarakat Kel. Samata	
10.	Makmur Sijaya	53 thn.	Tokoh MasyarakatKel. Samata	
11.	Taufik Dg. Rahman	28 thn.	Masyarakat Kel. Samata	

Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bentuk wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan menggunakan teknik wawancara tak terstruktur (*Non Structured Interview*).³⁶

Dengan wawancara ini, peneliti dapat menghasilkan data sebanyak-banyaknya yang ingin diungkapkan dengan maksud untuk menggali, memperoleh informasi yang lengkap dan efektif sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang pandangan masyarakat kelurahan Samata terhadap legalitas dinasti politik.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan tidak berperanserta, dengan fokus pengamatan terhadap aktivitas, perilaku politik dan interaksi sosial dalam realitas politik Pemilukada Kabupaten Gowa 2015.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data pendukung penelitian berupa dokumen pribadi informan, laporan tertulis, majalah, bulletin, berita media massa, sumber data *online* dan data lainnya yang relevan.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran pandangan masyarakat terhadap legalitas dinasti politik pada Pemilukada Gowa tahun 2015. Alat

³⁶ Matthew B Miles Dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992)h. 10-19.

yang akan digunakan dalam dokumentasi penelitian ini adalah kamera dan *handphone* untuk mengambil gambar dan merekam aktivitas masyarakat yang akan diwawancarai.

D. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, berangkat dari data khusus hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara, pengamatan dan dokumen yang telah terkumpul, kemudian dikorelasikan dengan pendekatan teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan umum. Adapun sistematika analisis dalam penelitian ini merujuk pada analisis data model interaktif oleh Haberman dan Miles,³⁷ sebagaimana uraian berikut:

- a. Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksikan, memfokuskan dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dimaksudkan untuk menentukan data sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.
- b. Penyajian data adalah metode mengorganisir suatu data yang memudahkan peneliti untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan. Sajian data pada penelitian ini adalah proses memilih data yang disesuaikan dengan fokus permasalahan dan tujuan penelitian.
- c. Verifikasi dan Penyimpulan data yaitu penjelasan tentang makna data dalam suatu konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alur kausalnya sehingga

³⁷Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, eds., *Handbook of Qualitative Research*, hal 122

dapat diajukan proposisi yang terkait dengannya. Pada tahap ini keseluruhan permasalahan dijawab sesuai dengan kategori data dan masalahnya dan menunjukkan kesimpulan yang mendalam dari temuan data penelitian.



BAB IV

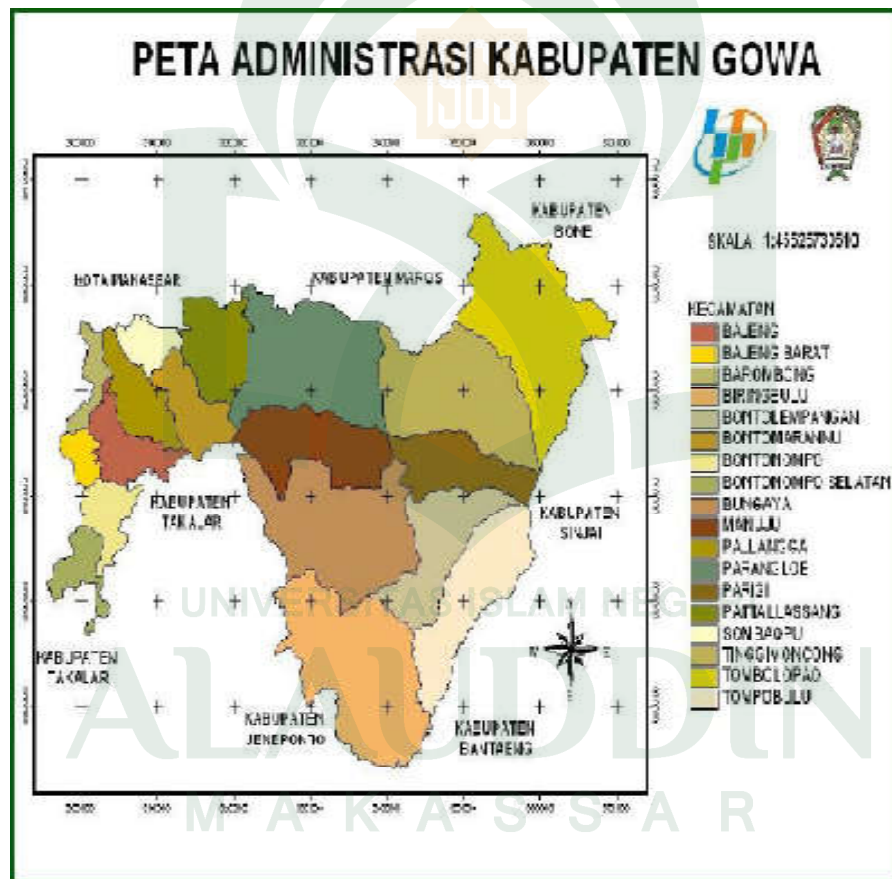
PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

a. Profil Kabupaten Gowa

1. Karakteristik Wilayah

PETA KABUPATEN GOWA



Sumber : BPS. Kab. Gowa 2015³⁸

³⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 1

1. Letak Geografi Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.³⁹

2. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Gowa

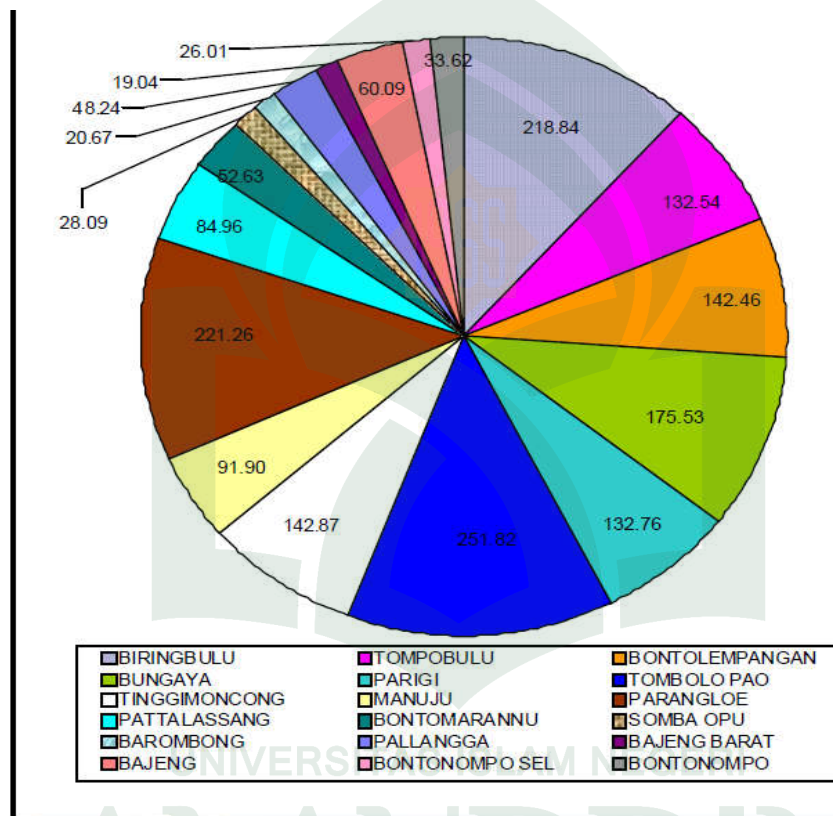
Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada

³⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 1

15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.⁴⁰

Grafik 1.1

Luas Daerah Administrasi (Km²) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gowa



Sumber : BPS. Kab. Gowa 2015⁴¹

Berdasarkan data curah hujanyaitu jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Serta alat untuk mengukur banyaknya curah hujan disebut Rain Gauge. Curah hujan diukur dalam jumlah harian, bulanan, dan tahunan. Curah hujan yang jatuh di satu daerah di Indonesia dipengaruhi oleh faktor

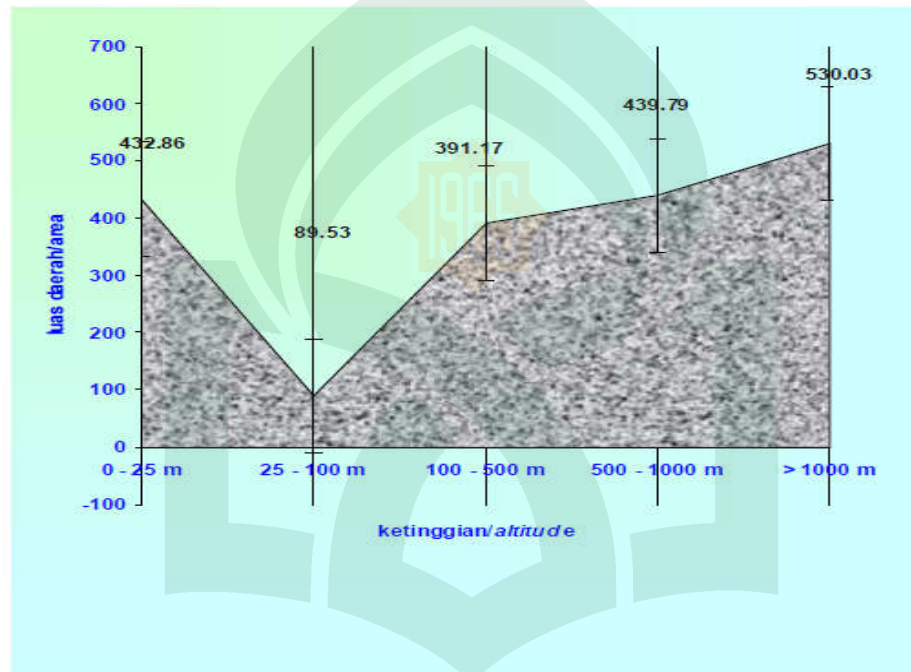
⁴⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 2

⁴¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 4

faktor sebagai berikut - *Bentuk medan/topografi*. - *Arah lereng medan*. - *Arah angin yang sejajar dengangaris pantai*. - *Jarak perjalanan angin di atasmedan datar*.⁴²

Grafik 1.2

Luas Daerah Menurut Ketinggian Dari Permukaan Laut



Sumber : BPS. Kab. Gowa 2015

2. Penduduk

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Rata-rata pertumbuhan Penduduk adalah

⁴²Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 2

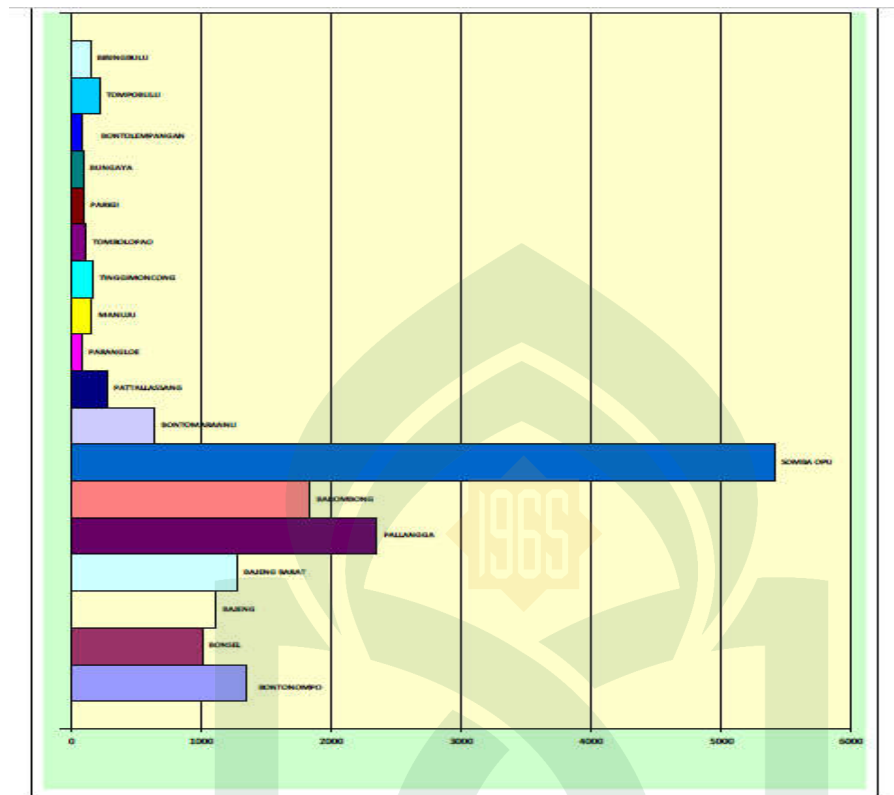
angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu.⁴³

Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebesar 136.995 jiwa dan Kecamatan Parigi adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terendah terendah, yaitu hanya sebesar 13.764 jiwa.

Grafik 1.3
Kepadatan Penduduk Per Km² Menurut Kecamatan Di Kabupaten
Gowa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

⁴³Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 40



Sumber : BPS. Kab. Gowa 2015⁴⁴

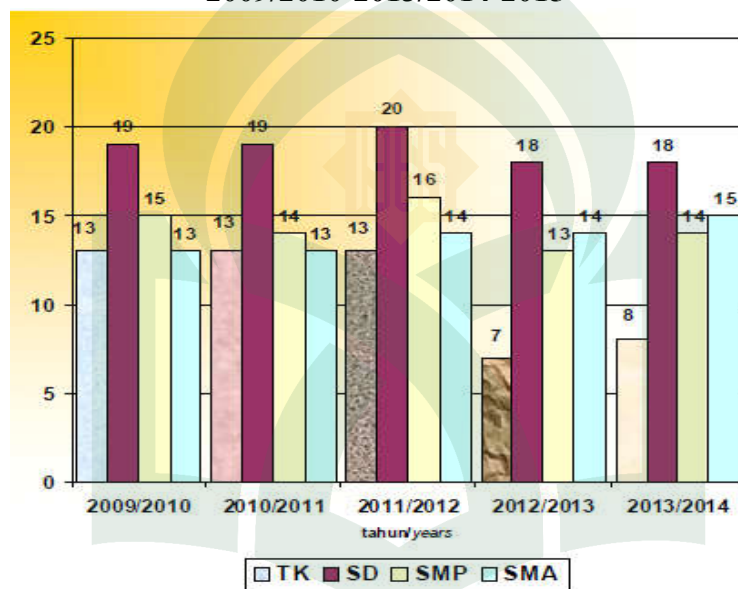
Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk menghitung besarnya semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti perumahan, sandang, pangan, pendidikan dan sarana penunjang lainnya. Berdasarkan hasil registrasi penduduk, Jumlah penduduk Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,4%. Total jumlah penduduk tersebut di tahun 2007 sebesar 594.423 jiwa dan meningkat terus di tahun 2012 menjadi 670.465 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang paling signifikan terjadi di Kecamatan Somba Opu yaitu sebesar 96.070 jiwa di

⁴⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 43

tahun 2007 dan terus meningkat hingga tahun 2012 mencapai 133.784 jiwa. Hal ini terjadi karena pesatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Somba Opu.⁴⁵

3. Pendidikan

Grafik : 1.4
RASIO MURID TERHADAP GURU MENURUT TINGKAT SEKOLAH DI
KABUPATEN GOWA
2009/2010-2013/2014-2015



Sumber : BPS. Kab. Gowa 2015⁴⁶

Tidak/Belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak pernah atau belum pernah mendaftar dan tidak pernah atau belum pernah aktif mengikuti pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C). Termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

Masih bersekolah adalah mereka yang mendaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal dan nonformal (Paket A, B, atau C), baik

⁴⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 41

⁴⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 64

pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi yang berada dibawah pengawasan Kemendiknas, Kemenag, Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta. Bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.

Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkannya tamat belajar/ Ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.⁴⁷

Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menuliskan kata/kalimat sederhana dengan suatu aksara tertentu.

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan yang cacat adalah pendidikan formal berdasarkan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan memakai kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA). Pondok pesantren/Madrasah diniyah adalah sekolah yang tidak memakai Kurikulum Pendidikan Nasional.

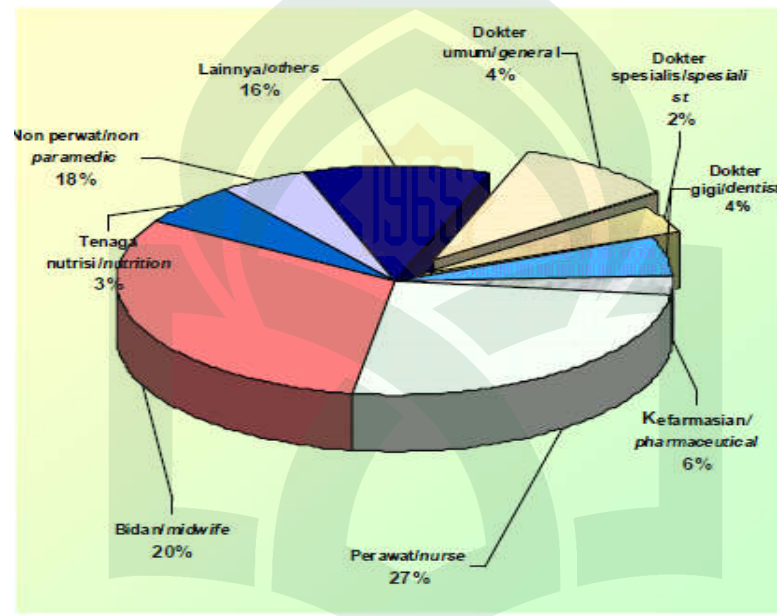
Madrasah ibtidaiyah adalah lembaga pendidikan berciri khas Islam sederajat Sekolah Dasar (SD). Madrasah Tsanawiyah adalah lembaga pendidikan berciri

⁴⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 57-58

keislaman sederajat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah adalah lembaga pendidikan berciri khas islam sederajat Sekolah Menengah Atas (SMA).⁴⁸

4. Kesehatan

Grafik: 1.5
JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN GOWA TAHUN 2014-2015



Sumber : BPS. Kab. Gowa 2015⁴⁹

a. Rumah Sakit (RS) adalah tempat pemeriksaan dan perawatan, biasanya berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, termasuk rumah sakit khusus seperti rumah sakit perawatan paru-paru dan RS jantung.

b. Rumah Sakit Bersalin/ Rumah bersalin adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan anak serta berada di bawah pengawasan dokter dan atau bidang senior.

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 58-59

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 65

c. Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan, biasanya tanpa fasilitas perawatan menginap, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, tidak termasuk klinik yang termasuk di puskesmas/rumah sakit. Poliklinik yang karena satu dan lain hal menyediakan tempat perawatan menginap, tetap digolongkan ke dalam poliklinik (bukan rumah sakit).⁵⁰

d. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau keseluruhan (misalnya DKI Jakarta). Tim puskesmas sesuai jadwal dapat melakukan kegiatan puskesmas keliling ke tempat-tempat tertentu dalam wilayah kerjanya, untuk mendekatkan pelayanan dengan masyarakat.

e. Puskesmas pembantu (Pustu) yaitu unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu kegiatan Puskesmas di sebagian dari wilayah kerja. Pada beberapa daerah balai pengobatan telah berubah fungsi menjadi Pustu walaupun papan nama masih tertulis balai pengobatan.

f. Apotik adalah tempat penjualan obat yang mempunyai izin operasi dari Departemen Kesehatan, u.p. Ditjen POM, di bawah pengawasan apoteker.

g. Imunisasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum.

⁵⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 59

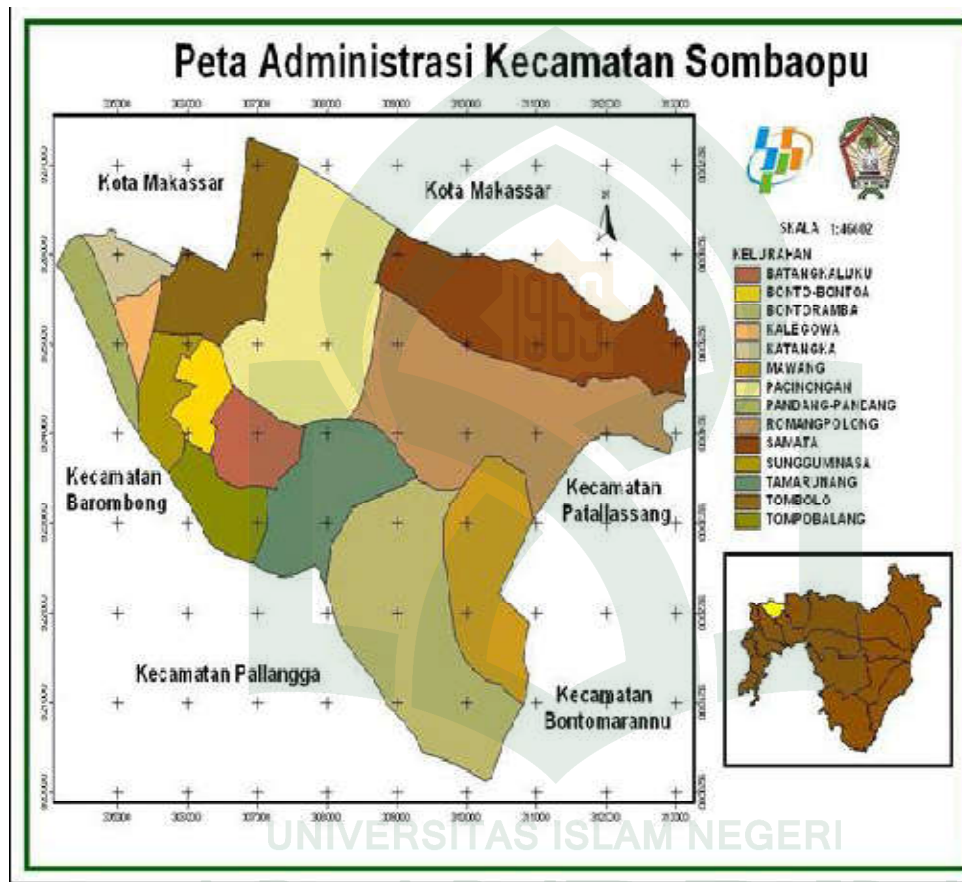
(ditetaskan dalam mulut) dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh penyakit tertentu.⁵¹



⁵¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 59-60

b. Profil Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

PETA KEC. SOMBAOPU



sumber:

BPS Kabupaten Gowa 2016

Kecamatan Somba Opu merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Gowa, terletak di dataran rendah berbatasan dengan beberapa kecamatan lain di Gowa, yakni kecamatan Bontomarannu dan Pattalassang di sebelah timur, kecamatan Pallangga di sebelah selatan, kecamatan Barombong dan Kota Makassar pada

sebelah barat, dan sebelah utara berbatasan dengan kota Makassar. Seperti kecamatan lain di kabupaten Gowa, Somba Opu terbentuk berdasarkan PERDANomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Gowa. Sungguminasa merupakan ibukota kecamatan sekaligus menjadi ibukota kabupaten Gowa. Somba Opu secara administratif terbagi kedalam 14 kelurahan, masing-masing:

a.) Kependudukan

Penyebaran penduduk Kabupaten Gowa masih bertumpu di Kecamatan Somba Opu yakni sebesar 19,95 persen dari total jumlah penduduk kabupaten Gowa sebesar 652.329 orang. Kecamatan Somba Opu juga merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya untuk wilayah perkotaan, yakni sebanyak 130.126 orang dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 64.442 orang dan perempuan sebesar 65.684. Kecamatan Somba Opu tercatat sebagai kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yakni sebanyak 4.632 orang/km². Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Somba Opu adalah yang tertinggi dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Gowa yakni sebesar 4,07 persen. Kecamatan Somba Opu memiliki rata-rata anggota rumah tangga terbesar sebanyak 4,65 orang dari total jumlah rumah tangga yakni 28.002 KK.⁵²

b.) Keadaan Geografi

BATAS WILAYAH

Utara : Kota Makassar

Timur : Kecamatan Bontomarannu

⁵² Draft Kantor Camat Somba Opu, *Hasil Sensus Penduduk tahun 2010*, profil Kec. Somba Opu

Selatan : Kecamatan Pallangga dan Kabupaten Takalar

Barat : Kecamatan Pallangga dan Kota Makassar

Luas wilayah 28.09 km² atau 2.809 Ha (1,49 % dari luas wilayah kabupaten Gowa) dengan ketinggian daerah/altitude berada 25 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah terletak pada dataran rendah dengan koordinat Geografis berada pada 5 derajat 12'5" LS dan 119 derajat 27'15" BT. Batas alam dengan kecamatan Pallangga adalah Sungai Jeneberang yaitu sungai dengan panjang 90 km dan luas Daerah Aliran Sungai 881 km².

c.) Pendidikan

Tabel : 2.1

**Jumlah Sekolah Menurut Kelurahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
2013-2015**

No.	Kelurahan	Sekolah							
		Taman Kanak- kanak (TK)	S D N	SD Inpr es	SLTP		SMU		SMK
					Nege ri	Swas ta	Negeri	Swas ta	
1	Pandang- pandang	1	2	3	-	1	1	1	1
2	Sungguminasa	10	3	2	3	2	-	2	3
3	Tompobalang	4	-	1	-	1	-	1	-
4	Batangkaluku	2	1	1	-	2	1	2	-
5	Tamarunang	11	-	3	-	-	-	-	-
6	Bontoramba	2	1	2	-	-	-	-	-
7	Mawang	1	-	1	-	-	-	-	-
8	Romangpolong	1	1	3	1	1	1	1	-
9	Bonto-Bontoa	5	3	3	-	2	-	2	3
10	Kalegowa	1	-	-	-	-	-	-	-
11	Katangka	4	-	3	-	-	-	-	-
12	Tombolo	9	-	3	-	1	-	1	1
13	Paccinongan	8	2	2	-	1	-	-	-

14	Samata	5	1	1	-	1	-	-	-
	2015	64	14	28	4	12	3	10	8
	2014	60	14	28	4	12	3	10	8
	JUMLAH 2013	59	14	28	4	12	3	10	8

sumber : Diknas Kab. Gowa

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran pendidikan, biasanya akan dapat mempertajam pola pikir individu, selain itu akan mempermudah menerima informasi yang lebih maju.

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya cukup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, ketersediaan pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini membuktikan penyediaan sekolah dalam setiap kelurahan dari tahun 2013-2015 tidak terjadi peningkatan atau pengurangan kapasitas pendidikan.

d.) Keagamaan

Jumlah tempat ibadah berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

1. Mesjid : 107 buah
2. Musholla : 16 buah
3. Langgar : 16 buah
4. Gereja : 7 buah

Jumlah Rohaniawan Islam adalah sebagai berikut :

1. Ulama : 6 orang
2. Khatib : 168 orang
3. Mubaligh : 93 orang
4. Penyuluh agama muda : 13 orang
5. Penyuluh agama madya : 7 orang

c. Profil Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

a. Letak Biografis Kelurahan Samata

Kelurahan Samata merupakan kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Samata memiliki luas 1,44 (km²) yang terdiri dari wilayah daratan. Kelurahan Samata merupakan wilayah yang berada sekitar 43 (m) diatas permukaan laut. Kelurahan Samata tidak memiliki wilayah pantai, kawasan lembah maupun kawasan lereng. Kelurahan Samata hanya memiliki daerah daratan. Kelurahan Samata memiliki jarak dengan Ibukota sejauh 7 (km). pembagian daerah administrasi di Kelurahan Samata yaitu dusun/lingkungannya terdapat 2 bagian, RW/RK sebanyak 8 bagian, dan RT 27 bagian. Adapun yang menjadi batas-batas Kelurahan Samata adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Romang Polong
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Paccinongan

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarunnu⁵³

b. Penduduk

Penduduk di Kelurahan Samata dari tahun 2013-2015 tercatat jumlah penduduknya 8.452 jiwa dan terbagi atas dua jenis kelamin. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.245 jiwa dan perempuan sebanyak 4.207 jiwa.⁵⁴ Dari data tersebut, menunjukkan bahwa penduduk di kelurahan Samata mencerminkan adanya keseimbangan dari jumlah jenis kelamin, dan juga distribusi warga yang merata.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan, membangun, dan memajukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil merupakan aset berharga dari suatu negara. Penduduk Kelurahan Samata, berdasarkan tingkat pendidikan dapat dikelompokkan dengan jumlah sekolah terdiri atas 5 buah, sedangkan muridnya terbagi atas dua yaitu laki-laki yang berjumlah 221 jiwa, perempuan berjumlah 215 jiwa dan gurunya berjumlah 14 jiwa. Ini tercatat pada tahun 2013-2015.⁵⁵

d. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka terjadi peningkatan kesejahteraan. Ketersediaan sarana kesehatan akan sangat menunjang peningkatan

⁵³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kecamatan Sombaopu dalam Angka 2016, hal 4-7

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kecamatan Sombaopu dalam Angka 2016*, hal 18

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kecamatan Sombaopu dalam Angka 2016*, hal 37

kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2013-2015 terdapat 1 tempat praktek dokter, 3 posyandu, dan memiliki beberapa apotek, namun belum memiliki gedung rumah sakit.⁵⁶

e. Agama

Sarana peribadatan merupakan tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing. Di Kelurahan Samata, terdapat beberapa sarana peribadatan, yaitu masjid terdiri dari 8 gedung dan 4 gedung mushola, sedangkan untuk gedung gereja di Kelurahan Samata belum menyediakan karena mayoritas agamanya menganut agama Islam.⁵⁷



⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kecamatan Sombaopu dalam Angka 2016*, hal 49-

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kecamatan Sombaopu dalam Angka 2016*, hal 42

d. Peraturan Larangan Dinasti Politik

Pemilukada merupakan sebuah implementasi kebijakan pemerintahan pusat serta merupakan proses demokrasi masyarakat ditingkat lokal, ini sejalan dengan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemilukada dilakukan untuk memilih kepala daerah di suatu daerah dengan prinsip demokrasi. Namun dalam proses pemilukada sering kali terjadi konflik-konflik politik, terutama yang berkaitan dengan wacana dinasti politik yang kontroversial di tengah masyarakat.

Kemunculan UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada dasarnya menjelaskan ketentuan adanya larangan “dinasti politik” dalam proses penentuan calon Kepala Daerah. Hal ini terutama ditegaskan dalam Pasal 7 huruf (r), bahwa:

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan, huruf (r) tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.⁵⁸

Berkenaan dengan ketentuan dari Pasal 7 huruf (r) UU No 8 Tahun 2015,

secara konseptual yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan adalah antara lain:

Tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.⁵⁹

⁵⁸UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

⁵⁹Penjelasan atas Pasal 7 huruf (r) UU No 8 Tahun 2015

Sementara di pihak penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat juga mempertegas larangan “dinasti politik” melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 9 tahun 2015 khususnya Pasal 1 ayat (19) tentang “Petahana” dan Pasal 4 ayat 1 huruf (q) tentang “tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana” dan Pasal 4 ayat (11) yang meliputi syarat calon sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana
- 2) Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana
- 3) Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan Petahana
- 4) Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana.⁶⁰

Meskipun frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” telah diperjelas melalui deskripsi hubungan kekeluargaan, namun ketentuan dalam peraturan ini memunculkan reaksi publik dimana beberapa pihak tidak setuju dengan segera meperkarakan (uji materi) peraturan tersebut secara hukum. Hal ini misalnya terjadi di Kabupaten Gowa dalam tahapan Pemilukada tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gowa.

⁶⁰Penjelasan atas Pasal 4 ayat 1 huruf (q) UU No 8 Tahun 2015 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 9 tahun 2015

Salah satu kontestan Pemilu 2015, Adnan Purichta Ichsan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Gowa 2015, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara “larangan dinasti politik” seperti yang dicantumkan Pasal 7 huruf (r) UU No 8 Tahun 2015. Adapun alasan Adnan Purichta Ichsan dalam gugatannya karena merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 7 huruf (r) UU No 8 Tahun 2015. Kerugian konstitusional yang dimaksud Adnan Purichta Ichsan adalah tertutupnya kesempatan untuk menduduki kursi jabatan kepala daerah di Kabupaten Gowa tahun 2015.

Faktanya kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi (No.33/PUU-XIII/2015) terhadap Pasal 7 huruf (r) UU No 8 Tahun 2015. Dalam publikasi berita harian Kompas, dijelaskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, dalam sidang putusannya di Gedung MK, menilai aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana telah melanggar konstitusi.⁶¹ Sementara Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Pasal 7 huruf r UU Pilkada mengandung muatan diskriminasi, di mana pasal tersebut memuat perbedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas status kelahiran dan kekerabatan seorang calon kepala daerah dengan petahana. Pasal 7 huruf r bertentangan dengan Pasal 28 j ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tampak nyata perbedaan dengan

⁶¹“MK: Larangan Keluarga Petahana Ikut Pilkada Melanggar Konstitusi”, Publikasi Berita Harian Kompas, <http://nasional.kompas.com> (diakses 31 Oktober 2016).

maksud untuk mencegah kelompok atau orang tertentu untuk menggunakan hak konstitusi, hak untuk dipilih.”⁶²

Dari aspek pertimbangan hukum para hakim tersebut diketahui bahwa idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa larangan dinasti politik (Pasal 7 huruf (r) UU No 8 tahun 2015) sebenarnya inkonstitusional dalam penyelenggaraan Pemilu pada 2015.



⁶²“MK: Larangan Keluarga Petahana Ikut Pilkada Melanggar Konstitusi”, Publikasi Berita Harian Kompas, <http://nasional.kompas.com> (diakses 31 Oktober 2016).

e. Jumlah Pemilih Kelurahan/desa di Kecamatan Sombaopu Kabupaten

Gowa Tahun 2015

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak pilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih. Dalam memberikan suaranya seorang pemilih terdaftar cukup menunjukkan KTP atau identitas lain serta paspor bagi WNI yang berada di luar negeri. Seseorang yang telah mempunyai hak pilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan :

1. Tidak mengganggu jiwa/ingatannya.
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.⁶³ Seperti yang dijelaskan diatas, maka penulis membuat tabel daftar pemilih tetap yang ada di Kecamatan Sombaopu termasuk kelurahan Samata.

⁶³Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2009) hal 168

Tabel: 5.1**Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Somba Opu 2015**

No.	Kecamatan/Desa	TPS	Jumlah Pemilih		Jumlah	Keterangan
			Laki-laki	Perempuan		
Somba Opu						
1	Batangkaluku	17	5.454	5.575	11.029	
2	Bonto-bontoa	17	5.502	6.037	11.539	
3	Bontoramba	5	1.410	1.526	2.936	
4	Kalegowa	4	1.072	1.286	2.358	
5	Katangka	12	3.211	3.298	6.509	
6	Mawang	5	1.634	1.698	3.332	
7	Paccinongan	27	8.423	8.873	17.296	
8	Pandang-pandang	10	2.981	3.145	6.126	
9	Romangpolong	9	2.840	3.005	5.845	
10	Samata	10	2.833	3.006	5.839	
11	Sungguminasa	10	2.746	3.107	5.853	
12	Tamarunang	18	5.575	5.751	11.326	
13	Tombolo	21	6.615	6.967	13.582	
14	Tompobalang	15	4.695	5.124	9.819	
Jumlah		180	54.991	58.398	113.389	

Sumber: KPU Gowa, 2015⁶⁴

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa tingkat pemilu pada tahun 2015 di kelurahan Paccinongan pesertanya lebih menonjol dibandingkan kelurahan-kelurahan lainnya, dengan jumlah rata-rata 17.296 jiwa dan terdiri dari 27 pusat TPS yang disebar di setiap tempat. Sedangkan di kelurahan Kalegowa merupakan daerah yang paling kurang jumlah pemilihnya yakni 2.358 jiwa dan memiliki TPS 4 buah yang disebar di setiap tempat. Dari jumlah rata-rata penduduk di kecamatan Sombaopu, jumlah pemilih tetap yang paling banyak adalah Kelurahan Paccinongan dan jumlah paling sedikit adalah kelurahan Kalegowa.

⁶⁴REKAP DPT PILKADA 2015_KPU GOWA-Per Desa

B. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

a. Pandangan Masyarakat Samata Kecamatan Sombaopu terhadap Legalitas Dinasti Politik Pada Pemilukada Gowa

1. Masyarakat yang Menyetujui Dinasti Politik

Perosalan legalitas dinasti politik yang sebelumnya dilarang dalam ketentuan UU No 8 tahun 2015 dan penerapannya melalui PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang larangan bagi keluarga petahana atau *incumbent* untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, bagi masyarakat Samata tidak menjadi persoalan yang berarti. Hal ini diketahui dari keterangan hasil wawancara dengan sejumlah warga Samata Kabupaten Gowa. Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Samata, mengemukakan:

“Masalah dinasti politik yang mungkin terjadi di Kabupaten Gowa itu sah-sah saja yang penting pemimpinnya ini berpendidikan kami sebagai warga pasti tetap memilih beliau karena sudah membuktikan kalau keluarganya sebelumnya yang menjabat di Kabupaten Gowa ini mereka membuktikan kalau mereka memang layak untuk memimpin. Kalau masalah Adnan terpilih karena kita melihat dari keluarganya yang dulu mereka semua berpendidikan dan bermasyarakat jadi dia juga layak menjadi pemimpin di Kabupaten Gowa ini.”⁶⁵

Pandangan ibu Nuryati menyatakan tidak ada reaksi penolakan terhadap dinasti politik. Reaksi ini menyimpulkan bahwa pemimpin yang menjabat berasal dari keturunan yang sebelumnya menjadi pemimpin di suatu daerah tidak menjadi masalah dalam sebuah wilayah. Hal lain juga diungkapkan oleh seorang warga di Kelurahan Samata, menyatakan bahwa:

⁶⁵Nuryati (27 tahun), masyarakat. Wawancara, Kelurahan Samata, 05 oktober, 2016.

*"Seandainya dinasti politik disahkan di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa mungkin itu sah-sah saja yang penting tidak melanggar aturan dan perundang-undangan yang ada, dan kalau dinasti ini dibangun untuk mensejahterakan masyarakat pasti semua warga masyarakat disini (Kabupaten Gowa) khususnya dikelurahan Samata menerima aturan yang ada yang penting bukan untuk kepentingan kelompok saja, karena hal itu sangat merugikan warga masyarakat"*⁶⁶

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh salah satu warga Kelurahan Samata, bahwa:

*"semua orang bisa menjadi pemimpin yang terpenting kinerja seorang pemimpin ini sesuai yang dijanjikan kepada masyarakat, jika seorang pemimpin di Kabupaten Gowa dari garis keturunan raja otomatis kita dipimpin dengan cara dinasti politik, namun sejauh ini kita belum pernah dipimpin oleh keturunan raja, melainkankita dipimpin oleh keluarga dari bapak Yasin Limpo yang latar belakang keluarganya darikeluaraga biasa namun karena kinerja mereka bagus dan membuktikan bahwa mereka pantas untuk memimpin kota ataupun kabupaten ini (Kabupaten Gowa), maka itu adalah hal yang sangat baik karena kita sebagai warga disini tidak melihat dari keturunan siapa mereka yang penting kinerjanya saat ini dan kedepannyaberjalan baik sesuai dengan prosedur yang ada."*⁶⁷

Pendapat informan tersebut di atas juga tidak mempersoalkan dinasti politik di Kabupaten Gowa, sebab fakta kepemimpinan dinasti politik yang dimaksud (keluarga Yasin Limpo) dianggap berhasil memimpin dan kriteria kapasitas pendidikan yang dimiliki menjadi tolak ukur kompetensi kepemimpinan. Hasil wawancara yang sama juga dikemukakan oleh beberapa warga, bahwa:

"Saya sebagai masyarakat yang sudah lama berdomisili di kelurahan Samata, tentu sudah mengetahui banyak perpolitikan yang terjadi di

⁶⁶Hendra (25 tahun) Tokoh Pemuda Kelurahan Samata, *Wawancara*, Kelurahan Samata, 05 oktober, 2016.

⁶⁷Dg. Anne (46 tahun) Tokoh Perempuan Kelurahan Samata, *Wawancara*, Kelurahan Samata, 05 oktober 2016.

Kabupaten Gowa khususnya di Kelurahan Samata, jika suatu saat dikelurahan ini terjadi politik dinasti mungkin itu sah-sah saja di mata warga masyarakat yang berada disini (Kelurahan Samata) yang penting cara kerjanya selalu baik dan visi misi yang diutarakan saat kampanye dilaksanakan dengan baik, jadi pemimpin yang dari garis keturunannya sudah berpengalaman di dunia politik mungkin saja cara kepemimpinannya akan baik dan bisa di terima oleh masyarakat.”⁶⁸

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh warga masyarakat, bahwa:

“Kalau saya sendiri setuju saja dengan dinasti politik, karena kalau misalnya dari keluarga pak Adnan Puricta Ichsan sudah percaya dengan kepemimpinannya karena kalau dari sisi amannya itu tidak ada yang akan mengganggu kepemimpinannya karena beliau berasal dari keluarga yang terpandang dan disegani oleh semua masyarakat kemudian yang saya maksud percaya itu, karena sudah melihat kepemimpinan sebelumnya yaitu bapak Syahrul Yasin Limpo ayah dari bapak Adnan itu sendiri.”⁶⁹

Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh warga masyarakat, bahwa:

“Dinasti Politik sudah ada sejak sejak lama di Indonesia dan kepemimpinan dinasti politik itu sendiri sudah tersebar luas di Negara kita. Jika di Sulawesi itu sendiri di sahkannya UU tentang dinasti politik apalagi di kabupaten Gowa ini yang sudah terkenal kepemimpinan dari keluarga bapak Syahrul Yasin Limpo itu sendiri, mungkin tidak ada masalah, karena kepemimpinan keluarga ini (Adnan Purichta ichsan) sudah berjalan cukup lama dan hampir semua keturunan dari keluarga ini memimpin di Kabupaten Gowa. Jadi semua itu tidak masalah dan mungkin baik untuk kabupaten Gowa.”⁷⁰

Dari berbagai keterangan wawancara yang telah diperoleh tersebut, maka sesungguhnya keberadaan dinasti politik bukan merupakan sesuatu yang terlarang

⁶⁸H. Makmur Hamka (48 tahun) Tokoh Masyarakat Kelurahan Samata, Wawancara, Kelurahan Samata, 06 oktober 2016)

⁶⁹Tuti Nilawaty (24 tahun), Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Samata, 07 oktober 2016.

⁷⁰Dg Illang (39 tahun) Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Samat, 07 oktober 2016.

karena dominan masyarakat kelurahan Samata tidak menolak akan adanya praktik dinasti politik di daerahnya.

2. Masyarakat yang Menyetujui Dinasti Politik dengan Syarat Demokrasi

Pemilukada merupakan sebuah implementasi kebijakan pemerintahan pusat serta merupakan proses demokrasi masyarakat ditingkat lokal, ini sejalan dengan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemilukada dilakukan untuk memilih kepala daerah di suatu daerah dengan prinsip demokrasi. Namun dalam proses pemilukada sering kali terjadi konflik-konflik politik, terutama yang berkaitan dengan wacana dinasti politik yang kontroversial di tengah masyarakat. Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Samata, mengemukakan:

“Pendapat saya tentang dinasti politik yg sekarang ini beda dengan orde baru sekarang ini politik sekarang itu amburadul atau bisa dibilang ngambang dan tidak jelas. politik dinasti di Kabupaten Gowa sah-sah saja dilaksanakan yang penting para pemimpin yang menjadi bupati itu berperilaku baik dan adil terhadap masyarakat. Sepanjang bupati ini tidak melaksanakan pemerintahan secara demokrasi dan menyimpang maka itu salah dan apabila dia melaksanakan pemerintahannya secara demokrasi maka bisa disebut itu politik demokrasi.”⁷¹

Dari keterangan wawancara tersebut, menegaskan perbedaan rezim pemerintahan antara rezim orde baru dengan rezim pasca reformasi, dimana informan berpendapat bahwa terdapat perbedaan pada kedua rezim tersebut yang intinya mempertanyakan realitas demokrasi. Sementara persoalan dinasti politik dianggap

⁷¹Makmur Sijaya (53 tahun), tokoh masyarakat. *Wawancara*, Kelurahan Samata, 28 september, 2016.

sah-sah saja sejauh nilai-nilai demokrasi substantif dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang warga di Kelurahan Samata, menyatakan bahwa:

Sementara itu pendapat lain dikemukakan oleh pemuka agama, mengatakan sebagai berikut:

“Politik dalam Islam itu ada dua yaitu politik untuk kepentingan orang banyak dan politik untuk kepentingan pribadi. Dinasti politik di era reformasi menurut saya sah-sah saja dilakukan dan siapa saja boleh melakukannya, dan praktik dinasti di Kab. Gowa ini, kita inikan orang Islam walaupun bagaimana cara kita berupaya untuk menjadi pemimpin kalau Allah tidak menghendaki dan tidak mengizinkan maka jangan bermimpi akan menjadi pemimpin. Jadi jika sekarang ini disebut dengan nama dinasti itu karena sudah ditunjuk oleh Allah. Kalau menurut saya dalam pandangan Islam tidak ada istilah dinasti-dinastian karena bagaimanapun kita berusaha untuk menjadi pemimpin kalau Allah tidak menghendaki maka itu tidak akan terjadi walaupun sebelumnya keluarganya telah menjadi pemimpin sebelumnya.”⁷²

Informasi yang diungkapkan oleh informan tersebut di atas lebih menjelaskan sudut pandang agama Islam, bahwa dinasti politik juga dipandang sah-sah saja dalam sebuah rezim pemerintahan sepanjang berdiri di atas kepentingan masyarakat banyak. Informan juga cenderung membenarkan praktik dinasti politik karena pemimpin yang melakukan itu adalah orang Islam sendiri, dimana latar historis kepemimpinan Islam menjadi tolak ukurnya. Keterangan wawancara penelitian tersebut pada intinya mendukung dinasti politik, bahwa dinasti politik itu tidak masalah jika memang

⁷²Jamaluddin Dg Nampo (56 tahun) Ketua Imam Kelurahan Samata, *Wawancara*, Kelurahan Samata, 05 oktober, 2016.

anggota-anggota yang naik dan menduduki kursi jabatan adalah orang yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan perbaikan dalam pemerintahan.

3. Masyarakat yang tidak menyetujui Dinasti Politik

Dinasti politik menjadi isu nasional yang berkembang di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Gowa. Wacana ini menjadi semakin kuat pasca pencalonan bapak Adnan Purichta Ichsan dan ibu Tenri Olle Yasin Limpo dalam pilkada serentak pada tahun 2015. Wacana ini memperoleh respon yang bervariasi di masyarakat Kelurahan Samata. Diantara respon itu, tampak dalam pandangan Muh. Sukri, ia mengatakan bahwa:

“Saya tidak setuju jika dinasti politik dilakukan di Kabupaten Gowa karena kita sebagai warga masyarakat tidak bisa memilih atau berdemokrasi yang selama ini terlaksanakan di Kabupaten Gowa, kita bisa memilih dengan pilihan kita, kita juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat lainnya yang masing-masing punya pilihan tersendiri, jika dinasti politik dilegalkan atau disahkan maka kita tidak bisa lagi berdemokrasi dan memilih sesuai pilihan hati kita.”⁷³

Pandangan Muh. Sukri menyatakan ada reaksi penolakan terhadap wacana dinasti politik. Respons semacam ini berlawanan dengan masyarakat Gowa. Mengapa respon yang menolak muncul, karena dianggap membajak demokrasi yang sedang dibangun. Demokrasi memberi ruang yang sama kepada semua warga, pandangan ini sejalan dengan bapak Ibrahim Dg Gassing yang menyebutkan bahwa:

“Demokrasi yang selama ini kita laksanakan sangat berperan penting di Negara kita, karena dengan berdemokrasi kita bisa menentukan pilhan

⁷³Muh.Sukri (27 tahun), Tokoh Pemuda Kelurahan Samata, Wawancara, Kelurahan Samata, Wawancara, Kelurahan Samata, 07 oktober 2016. Samata, 06 oktober 2016.

kita, namun jika dinasti politik disahkan secara perlahan demokrasi akan hilang terutama di Kabupaten Gowa karena hak kita untuk memilih otomatis akan hilang karena keturunan dari pemimpin sebelumnya akan menggantikan pemimpin yang lama tanpa berkampanye dan melakukan pemilihan. Kita sebagai warga masyarakat hanya bisa menerima siapa pemimpin kita yang penting beliau jujur dan bertanggungjawab atas visi dan misi yang telah diungkapkan kepada warga masyarakat dan menjalankan dengan baik.”⁷⁴

Pendapat bapak Ibrahim Dg Sompia diatas, sangat jelas beliau mempertahankan sistem demokrasi yang telah dibangun. Demokrasi yang selama ini dijalankan oleh masyarakat tidak ingin dihilangkan karena adanya sistem dinasti politik yang menjadi halangan masyarakat untuk berdemokrasi. Seperti halnya bapak Ibrahim, bapak Taufik Dg Rahman juga mengemukakan pendapatnya:

“saya tidak setuju dengan disahkannya dinasti politik, karena tidak demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang mengandalkan ketenaran keluarganya saja bukannya tidak ada pilihan namun memaksa kita untuk memilih satu pemimpin saja dan pemerintahan dinasti hanya melegalkan kekuasaannya secara turun temurun kepentingan, kepentingan rakyat mungkin hanyalah dinomor duakan.”⁷⁵

Pendapat diatas, menyatakan bahwa bapak Taufik Dg Rahman tidak menyetujui adanya wacana tentang dinasti politik karena menurut beliau memaksa warga masyarakatnya memilih satu pemimpin saja dan tidak memberikan peluang untuk berdemokrasi.

Hasil wawancara penulis diatas menjelaskan bahwa mereka kurang setuju jika dinasti politik dilaksanakan di Kabupaten Gowa. Karena jika dinasti politik

⁷⁴H. Ibrahim dg Gassing (73 tahun), Kepala Lingkungan Masyarakat Kelurahan Samata, Wawancara, Kelurahan Samata, 05 oktober 2016.

⁷⁵Taufik dg Rahman (28 tahun), Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Samata, 07 oktober 2016.

direalisasikan atau disahkan maka demokrasi yang selama ini dilaksanakan akan hilang dengan adanya dinasti politik. Namun disisi lain mereka juga menginginkan pemimpin yang bijaksana dan sejauh ini mereka melihat kerja dari keluarga Adnan Purichta ihsan yang sebelumnya sudah memimpin di Kabupaten Gowa dengan baik, jadi mereka tetap mendukung pemimpin yang ada dengan alasan kinerja Adnan Purichta ihsan dan keluarga sejauh ini tidak mengecewakan.

Penggunaan kekuasaan berlangsung dan bekerja dalam ruang pilihan-pilihan bagi mereka yang berada dalam posisi untuk memilih. Kekuasaan mempengaruhi pilihan-pilihan atas beberapa kemungkinan pilihan. Kekuasaan ditunjukan dengan adanya kebebasan untuk memilih dan dijalankan terhadap subjek-subjek bebas yang memiliki kebebasan untuk memilih dan mempengaruhi. Kekuasaan terwujud dalam pemunculan dan pelibatan “permainan-permainan strategi antara pemilik-pemilik kebebasan memilih (*strategis games between liberties*).⁷⁶

Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Sebelum munculnya gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan elit partai politik, elit militer dan

⁷⁶ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013) hal. 74-75.

polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta elit aktifis.⁷⁷

Kedua teori di atas, menunjukkan bahwa pemimpin yang dipercaya setiap warga tidak harus dari keluarga yang bergaris turunan dinasti atau memiliki kekuasaan di setiap daerah. Teori diatas akan dijadikan pisau analisa untuk melihat kepemimpinan seorang Adnan Purichta ihsan dalam memimpin suatu daerah yaitu sebagai Bupati Kabupaten Gowa periode 2016-2021.

b. Respon KPU Terhadap Legalitas Politik Dinasti di kabupaten Gowa

Pasca putusan final MK No.33/PUU-XIII/2015 yang menganulir larangan dinasti politik dalam Pasal 7 huruf (r) UU No 8 tahun 2015, KPU Pusat menindaklanjuti keputusan MK tersebut melalui penerbitan PKPU No 12 tahun 2015 tentang perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan adanya ketentuan PKPU tersebut maka KPUD Kabupaten Gowa sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu di daerah wajib melaksanakan pertauran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap anggota KPUD Kabupaten Gowa, menyatakan bahwa sebagai lembaga yang independen harus melaksanakan ketentuan peraturan sebagaimana putusan final Mahkamah

⁷⁷”Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Politik” <http://riset.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/PERANGKAP-DINASTI-POLITIK-DALAM-KONSOLIDASI-DEMOKRASI.pdf>, hal. 117 diakses Kamis, tanggal 1 Desember 2016

Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 yang menganulir larangan dinasti politik dalam UU No 8 tahun 2015. Hal ini diungkapkan oleh anggota KPUD Kabupaten Gowa,:

“KPU itu sendiri apapun yang ditetapkan oleh aturan UU pihak dewan yang disana (DPR) maka KPU wajib melaksanakan apapun isi UU-nya termasuk larangan dinasti politik tentang Pasal 7 huruf (r) UU No 8 tahun 2015 kemarin. Kemudian pasal tersebut dihilangkan dengan alasan semua warganegara Indonesia memiliki hak yang sama siapapun dia.”⁷⁸

Dari keterangan informan tersebut di atas, diketahui bahwa pada awalnya kemunculan tentang larangan “dinasti politik” bersumber dari konstruksi kebijakan legislasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang merumuskan undang-undang Pemilukada. Namun karena Pasal 7 huruf (r) UU No 8 tahun 2015 beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan melanggar hak warga negara, maka konsekuensinya aturan larangan dinasti politik dihapus. Lebih lanjut anggota KPUD Kabupaten Gowa mengemukakan:

“KPU wajib merevisi PKPU menindaklanjuti putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Kita harus apresiasi putusan MK yang menilai syarat kepala daerah seperti yang diatur dalam UU No 8 tahun 2015 tersebut melanggar konstitusi.”⁷⁹

Keterangan informan tersebut di atas menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi Kepala Daerah seperti yang diatur dalam UU No 8 tahun 2015 sebenarnya

⁷⁸Nur Safitriani (28 tahun), anggota KPUD Kabupaten Gowa. *Wawancara*, Sekretariat KPUD Kabupaten Gowa, 07 oktober, 2016.

⁷⁹Muh.Adam (42 tahun), anggota KPUD Kabupaten Gowa. *Wawancara*, Sekretariat KPUD Kabupaten Gowa, 07 oktober, 2016.

melanggar konstitusi. Pemikiran informan ini didukung dengan fakta keputusan final MK No.33/PUU-XIII/2015 menganulir larangan dinasti politik dalam Pasal 7 huruf (r) UU No 8 tahun 2015 dan juga tindaklanjut KPU Pusat melalui penerbitan PKPU No 12 tahun 2015 tentang perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015.

Dengan demikian KPU yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk KPUD Kabupaten Gowa, berkewajiban melaksanakan peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan PemiluKada di daerah, khususnya eksistensi PKPU No 12 tahun 2015 sebagai tindaklanjut keputusan final MK dan hasil revisi atas Pasal 4 ayat 1 huruf (q) PKPU Nomor 9 Tahun 2015. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh anggota KPUD Kabupaten Gowa mengemukakan:

“KPU itukan sifatnya hirarkis berhubungan erat dengan kabupaten dengan pusat jadi kami selalu bekerja sesuai aturan-aturan atau mekanisme yang sudah ada baik yg tertulis maupun tidak tertulis. Respon KPU terhadap pembatalan Pasal 7 huruf (r) UU No 8 tahun 2015 adalah kalau UU terbentuk otomatis KPU secara struktural itu melaksanakan UU-nya dengan menerbitkan PKPU. Peraturan KPU dilingkungan untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan aturan ini. Secara teknis dilaksanakannya itu diterbitkan oleh KPU Pusat pada saat itu, dan kami sudah melaksanakan sebelum pasca adanya keputusan MK. Setelah ada keputusan dari MK, KPU tetap melaksanakan karena itu aturan juga bahwa Pasal 7 huruf (r) itu tidak berlaku lagi.”⁸⁰

Dari berbagai keterangan yang telah diperoleh tersebut, maka sesungguhnya keberadaan unsur petahana yang terlibat langsung sebagai kontestan PemiluKada bukan merupakan sesuatu yang terlarang, dengan kata lain dapat dikatakan dinasti

⁸⁰Lukman (41 tahun), Kasubag Teknis KPUD Kabupaten Gowa. *Wawancara*, Sekretariat KPUD Kabupaten Gowa, 07 oktober, 2016.

politik itu legal. Meski sejumlah informan tidak menyatakan secara eksplisit tentang “legalitas dinasti politik” tersebut, namun keberadaan putusan MK dan PKPU secara tidak langsung melegalkan dinasti politik.

Faktanya kemudian KPUD Kabupaten Gowa melaksanakan ketentuan terbaru tentang pembolehan unsur petahana terlibat langsung sebagai kontestan Pemilu atau dapat mendaftarkan dirinya sebagai calon Kepala Daerah (Bupati) di Pemilu Gowa pada tahun 2015. Lebih tegasnya KPUD Kabupaten Gowa secara teknis operasional membuat petunjuk teknis (Juknis) yang intinya tidak menolak petahana dalam pendaftaran calon bupati di Pemilu Gowa 2015 seperti yang diungkapkan oleh anggota KPUD Kabupaten Gowa:

“Kalau masalah tindak lanjut KPU terhadap pasal itu otomatis telah MK menerbitkan hasil bahwa pasal itu kemudian minta dihilangkan, yah KPU kemudian menerbitkan juknis untuk semua Kabupaten/Kota bahwa dalam pencalonan itu kita sudah tidak boleh lagi menolak petahana itu karena pasal itu sudah dihapus.”⁸¹

Dengan demikian diketahui bahwa KPUD Kabupaten Gowa menindaklanjuti PKPU yang telah direvisi berdasarkan ketentuan putusan MK No.33/PUU-XIII/2015 yang juga telah menganulir Pasal 7 huruf (r) UU No 8 tahun 2015. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan PKPU bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

⁸¹Dinar (27 tahun), anggota KPUD Kabupaten Gowa. *Wawancara*, Sekretariat KPUD Kabupaten Gowa, 07 oktober, 2016.

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Dari aspek pertimbangan hukum para hakim tersebut diketahui bahwa idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa larangan dinasti politik (Pasal 7 huruf (r) UU No 8 tahun 2015) sebenarnya inkonstitusional dalam penyelenggaraan Pemilu pada 2015.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan informan penelitian bahwa pengajuan permohonan untuk uji materi terhadap suatu peraturan merupakan hak setiap warga negara apabila merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Anggota KPUD Kabupaten Gowa mengemukakan:

“Sebenarnya itu kalau kita mengajukan yudisial audiensi di MK adalah hak semua orang siapapun itu apabila dia dirugikan oleh aturan itu. Apabila ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai atau secara logika atau dia sepertinya hak demokrasiya dikebiri seperti itu. Berdasarkan aturan itu maka dia punya hak untuk mengusulkan di MK terkait pasal-pasal tersebut. Maka itulah sikap yang ditunjukkan oleh Adnan Puricita Ichsan terhadap pasal petahana itu.”⁸²

Pernyataan informan tersebut mengindikasikan bahwa Adnan Puricita Ichsan sebenarnya menjadi korban atas peraturan larangan berdinasti politik, dimana Adnan

⁸² Andirman (41 tahun), anggota KPUD Kabupaten Gowa. *Wawancara*, Sekretariat KPUD Kabupaten Gowa, 07 oktober, 2016.

Purieta Ichsan “dirugikan” oleh aturan atau hak demokrasi “dikebiri”. Keterangan senada juga diungkapkan oleh anggota KPUD Kabupaten Gowa lainnya yang mengemukakan:

“Saat itu MK memang memutuskan bahwa berdasarkan UU bahwa seluruh masyarakat Indonesia punya hak demokrasi yang sama siapapun dia, anak pejabat sekalipun. Tapi kemudian UU itu membatasi itu kemarin terkait pasal petahana. Oleh karena itu Adnan menggunakan haknya itu untuk meninjau ulang pasal itu dan MK mengabulkan bahwa memang setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk berdemokrasi.”⁸³

Berdasarkan keterangan informan tersebut di atas, diketahui bahwa konteks petahana atau larangan dinasti politik dalam Pasal 7 huruf (r) UU No 8 tahun 2015 dihapuskan melalui keputusan final MK No.33/PUU-XIII/2015. Sebagai konsekuensinya KPU Pusat juga mengubah PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang memuat pengertian petahana pasca keluarnya putusan MK. Perubahan terhadap kedua peraturan tersebut terhadap Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28 j ayat (2) UUD 1945 bahwa kemerdekaan itu hak semua orang, di mana warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin.

Dari hasil perbandingan dua sudut pandang (triangulasi data) antara pihak penyelenggara Pemilu atau KPUD Kabupaten Gowa dengan warga masyarakat Samata, diperoleh keterangan yang cenderung sama bahwa pembatalan atas larangan dinasti politik dalam kontes hukum maupun dalam konteks politik mengenai legalitas dinasti politik bukan persoalan yang signifikan.

⁸³Dwi Eka (34 tahun), anggota KPUD Kabupaten Gowa. *Wawancara*, Sekretariat KPUD Kabupaten Gowa, 07 oktober, 2016.

Fakta hukumnya MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 huruf r terkait syarat larangan bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana, dimana hal itu dianggap diskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Fakta empirisnya Adnan Purichta Ichsan yang notabene putra Bupati Gowa Sulsel, Ichsan Yasin Limpo kini (tahun 2016) telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Gowa. Hal ini terjadi karena sebelumnya KPUD Kabupaten Gowa merealisasikan peraturan KPU Pusat (PKPU No 12 tahun 2015) yang intinya memberikan keleluasaan politik bagi Adnan Purichta Ichsan untuk bertarung dalam Pemilukada Kabupaten Gowa tahun 2015.

KPUD Kabupaten Gowa sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengekang Adnan Purichta Ichsan untuk maju sebagai calon Bupati Gowa karena hanya berfungsi sebagai eksekutor (penyelenggara Pemilikada) dan secara hukum serta mekanisme struktural tunduk di bawah peraturan pemerintah pusat. Adnan Purichta Ichsan yang meminta agar syarat calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana dihapus karena diskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Namun demikian permohonan tersebut lebih cenderung pada pertimbangan yang bersifat politis. Seolah-olah setiap calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan petahana dipastikan akan membangun dinasti politik yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa. Sedangkan Pemerintah sebelumnya menganggap ketentuan politik pembatasan konflik kepentingan dengan petahana (dinasti politik) dalam Pemilukada telah sejalan dengan

Pasal 28 j ayat (2) UUD 1945 dimana pembatasan konflik kepentingan itu merupakan bentuk penghormatan hak orang lain agar menjamin dan memberi peluang konstetasi secara jujur dalam Pemilukada.

Menurut penulis pembatasan ini perlu agar posisi para pihak yang berkontestasi dalam Pemilukada setara. Praktik dinasti politik yang terjadi di sejumlah daerah terutama di Sulawesi Selatan mendapatkan resistensi masyarakat. Hasil survei *International Fondation for Electoral Systems* (IFES) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2014, menyatakan bahwa mayoritas responden menyatakan praktik politik dinasti berdampak negatif bagi masyarakat. Rata-rata mereka beralasan dinasti politik cenderung membuat marak korupsi, tidak demokratis, dan lebih mementingkan politik daripada kepentingan rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan menjadi dua bagian mengenai pandangan masyarakat kelurahan Samata kecamatan Somba Opu terhadap legalitas dinasti politik pada pemilukada Gowa tahun 2015.

1. Pandangan masyarakat kelurahan Samata kecamatan Somba Opu terhadap legalitas dinasti politik pada pemilukada Gowa tahun 2015 yang memiliki tiga pendapat dalam hasil wawancara penulis bersama masyarakat di kelurahan Samata. Pertama, masyarakat yang menyetujui dinasti politik. Kedua, masyarakat yang menyetujui dinasti politik dengan demokrasi. Ketiga, pola sikap masyarakat yang menyetujui dinasti politik. Dari ketiga point diatas menjelaskan perbedaan pendapat mengenai dinasti politik, namun ketiganya memiliki satu kesamaan yaitu masyarakat kelurahan Samata tetap menginginkan memilih secara demokratis.

2. Respon KPU terhadap legalitas dinasti politik di kabupaten Gowa. Hal ini menunjukkan bahwa respon KPU pada dasarnya hanya mengikuti dan menjalankan setiap keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MA) dan dijalankan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

B. Implikasi Penelitian

Sebagai penulis yang mencoba berdiri pada posisi yang akademis dan objektif maka dengan ini penulis mencoba memberikan saran-saran atau masukan kepada masyarakat Kelurahan Samata dan para pembaca:

1. Masyarakat Kelurahan Samata harusnya mempertahankan sistem demokrasi yang selama ini diterapkan di setiap daerah termasuk di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Terkait dengan dinasti politik semoga sistem ini tidak pernah dilegalisasikan di Indonesia termasuk di Kabupaen Gowa agar demokrasi yang selama ini sudah dibangun tetap dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata, Kementerian Agama RI.

At-Thayyib; Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2011

Abdullah, Rozali. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*,

Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2009

Alam, Samsu. *Dinasti Politik Pemerintah Desa di Kabupaten Polewali Mandar,*

Skripsi. (Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar)

Amelia, Masda Putri. *Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring*

Kekuasaan pada Walikota Probolinggo, Jurnal Politik Muda, Vol. 4, No. 3, Agustus-Desember 2015

Agustino, Leo dan Mohammad Agus Yusoff, *Politik Lokal di Indonesia: Dari*

Otokratik ke Reformasi Politik, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kecamatan Somba Opu Dalam Angka 2016*

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu wal Marjan, Himpunan Hadis yang*

disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Cet. II; Surabaya: Bina Ilmu, 2003

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan*

Ilmu Sosial Lainnya. Cet.II; Jakarta: Prenada Media Group, 2008

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013

Draft Kantor Camat Somba Opu, profil Kec. Somba Opu, 2010

Haryanto. *Klanisasi Demokrasi (Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan)*. Yogyakarta: Polgom. 2014

Husain, Husman, *Politik Dinasti Studi Terhadap Kepemimpinan Andi Idris Galigo periode 2008-2013 di Kabupaten Bone, Skripsi*, (Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2014)

Karim, Syahrir. *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*. Makassar: Alauddin University Press. 2012

Miles Matthew B Dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992),

Moleong, Lexy Johannes. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

Sugiprawaty. *Etnisitas, Primordialisme, dan Jejarang Politik di Sulawesi Selatan; Studi Pilkada di Sulawesi Selatan. Tesis* (Jurusan Ilmu Politik Pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009)

Suyadi. *Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia, Skripsi*, (Jurusan Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Tanjung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Proposal, Skripsi, Tesis*. Jakarta:

Kencana Prenada, 2007

<https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/09/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-maa-idah-ayat-57-58/> diakses Kamis, 09 Februari 2017

<http://digilib.uinsby.ac.id/6385/5/Bab%202.pdf> diakses Sabtu, 19 November 2016

<http://nasional.kompas.com>, *Publikasi Berita Harian Kompas, MK: Larangan Keluarga Petahana Ikut Pilkada Melanggar Konstitusi*” diakses 31 Oktober 2016

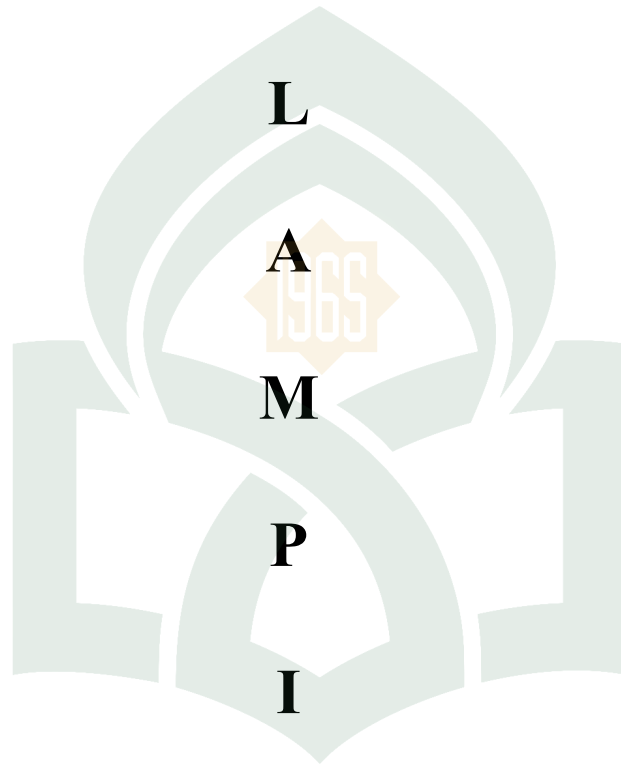
<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/06/16125681/Politik.Dinasti.dan.UU.Pemilukada>, diakses Jumat, 19 Februari 2016

<http://newtafsir.blogspot.co.id/2015/10/qs-nisa-ayat-58.html>, diakses Kamis 09 Februari 2017

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22529/3/Chapter%20II.pdf> diakses Sabtu, 19 November 2016

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5974/1/ANGGI%20RIA%20PUSPITASARI-FDK.PDF>, diakses Kamis, 1 Desember 2016

<https://zunlynadia.wordpress.com/2010/12/28/hadis-hadis-tentang-pemimpin/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

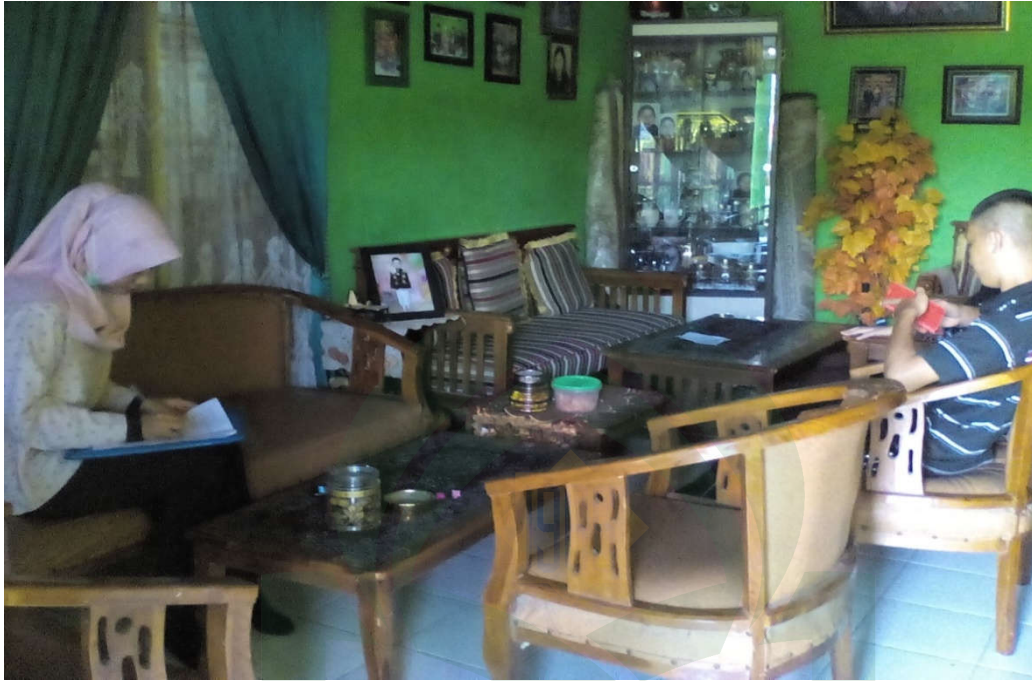
N



Wawancara bersama bapak Makmur Sijaya (Tokoh Masyarakat Kelurahan Samata)



Wawancara bersama bapak Jamaluddin Dg. Nampo dan ibu Dg. Anne (Ketua Imam di Kelurahan Samata dan tokoh perempuan Kelurahan Samata)



Wawancara bersama Hendra (Tokoh pemuda masyarakat Kelurahan Samata)



Wawancara bersama H. Ibrahim dg Gassing (Kepala Lingkungan kelurahan Samata)



Wawancara bersama bapak Lukman (Kasubag Teknis KPU Gowa)

Riwayat Hidup



MISRA SAVITRI, lahir di Baliara 10 januari 1995. Anak ke tiga dari tiga bersaudara, buah hati dari H. Abdin T. dan Hj. Maryana. Mulai memasuki jenjang pendidikan formal di SD Negeri 1 Baliara pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di

Madrasah Tsanawiah Swasta (MTsS) pada tahun 2006 sampai 2009, pada tahun yang sama (2009), penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Kabaena dan tamat pada tahun 2012.

Setelah menamatkan pendidikan di SMA, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil jurusan ilmu politik pada Fakultas ushuluddin filsafat dan politik pada tahun 2012, pada tahun 2012 masuk di organisasi AMIP (Asosiasi Mahasiswi Ilmu Politik) pada tahun 2012 dan bergabung di organisasi daerah (Organda) yaitu IMKM (Ikatan Mahasiswa Kabaena Makassar) pada awal tahun 2016 sampai sekarang.